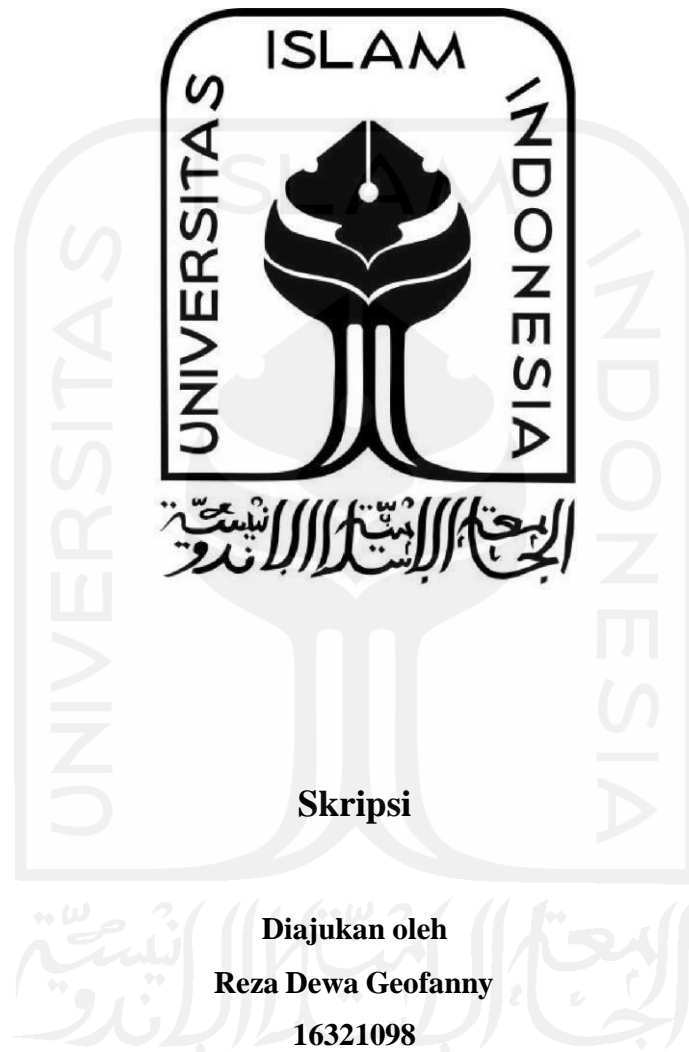


**EKONOMI POLITIK ISU-ISU PEMBANGUNAN
DAERAH DI MEDIA KALTIM POST**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2020/2021**

SKRIPSI

Ekonomi Politik Isu-Isu Pembangunan Daerah di Media Kaltim Post



Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 27 Januari 2021
Dosen Pembimbingan Skripsi,

المعتمد الامتياز الاندوني
Puji Rianto, S.I.P.,MA

NIDN 0503057601

المعتمد الامتياز الاندوني

Lembar Pengesahan

SKRIPSI

Ekonomi Politik Isu-Isu Pembangunan Daerah di Media Kaltim Post

Disusun Oleh :
REZA DEWA GEOFANNY
16321142

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam
Indonesia Tanggal : 27 Januari 2021.

Dewan Penguji:

1. Puji Rianto, S.I.P.,MA
NIDN 0503057601
2. Narayana Mahendra Prastya, S.Sos, M.A
NIDM 0520058400


(.....)

(.....)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia




Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom
NIDN 0529098201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Reza Dewa Geofanny

Nomor Mahasiswa : 16321098

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, ..27..Januari.2021.....

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
5000
71F97AJX197917437

Reza Dewa Geofanny
16321098

MOTTO

Belajar dari hari kemaren
Hidup untuk hari ini
Berharap untuk hari esok

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah, Ibu dan segenap keluarga saya yang tidak pernah berhenti memberikan semangat serta motivasi pada saya
2. Dosen Pembimbing saya Bapak Puji Rianto yang sudah sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Teman-teman saya yang sudah mensupport saya sejauh ini

الجامعة الإسلامية
الاستدراكية

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabil'amin, segala puji bagi Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Ekonomi Politik Isu-Isu Pembangunan Daerah di Media Kaltim Post” dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan penelitian ini ditujukan sebagai syarat pelengkap guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama proses pengerjaan penelitian ini penulis banyak melibatkan bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materi maupun non materi. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih yang teramat dalam kepada :

1. Mamah, Papah, Nenek, Ibu Icha, Om Tommy, Enja, Paje, dan Mpey yang selalu mendoakan dan selalu mendukung serta menghibur disaat aku mengerjakan skripsi ini. Walaupun jauh, kalian tetap nomor satu untukku. Selalu jadi keluarga yang lucu dan menyebarkan ya.
2. Sheera Novenia yang juga selalu menemaniku semenjak aku kecil hingga dewasa seperti sekarang. Trimakasih mba sudah membuatku menjadi anak yang pemberani. Trimakasih sudah selalu ada disaat aku susah. Walaupun banyak bertengkar, tapi aku tetap sayang kamu. Maaf kalau aku terlihat cuek tapi sejujurnya aku peduli. Sudah saatnya kita hidup masing-masing dan membangun hidup yang kita inginkan. Kalau ada apa-apa, aku pasti selalu ada. Karna family always first.
3. Puji Hariyanti,S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
4. Puji Rianto, S.I.P.,MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Banyak terimakasih penulis sampaikan kepada beliau atas segala kesabarannya dalam membimbing penulis. Segala ilmu dan pengalaman yang bapak berikan akan selalu saya ingat. Semoga bapak dan keluarga senantiasa diberikan kebahagiaan.
5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi atas segala bekal ilmu yang diberikan sungguh sangat bermanfaat.
6. Segenap Staff dan Karyawan Program Studi Ilmu Komunikasi atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Dyah Winahyu yang gak pernah capek untuk mengingatkanku untuk selalu menjadi orng yang lebih baik lagi. Selalu membantu dan mendukungku selama masa kuliah. Bingung bagaimana cara membalas kebaikan yang sudah Wina kasih. Jangan terlalu mendengarkan apa yang dikatakan orng lain terhadapmu. Tetap jalanin apa yang kamu mau. InsyaAllah aku selalu disampingmu.

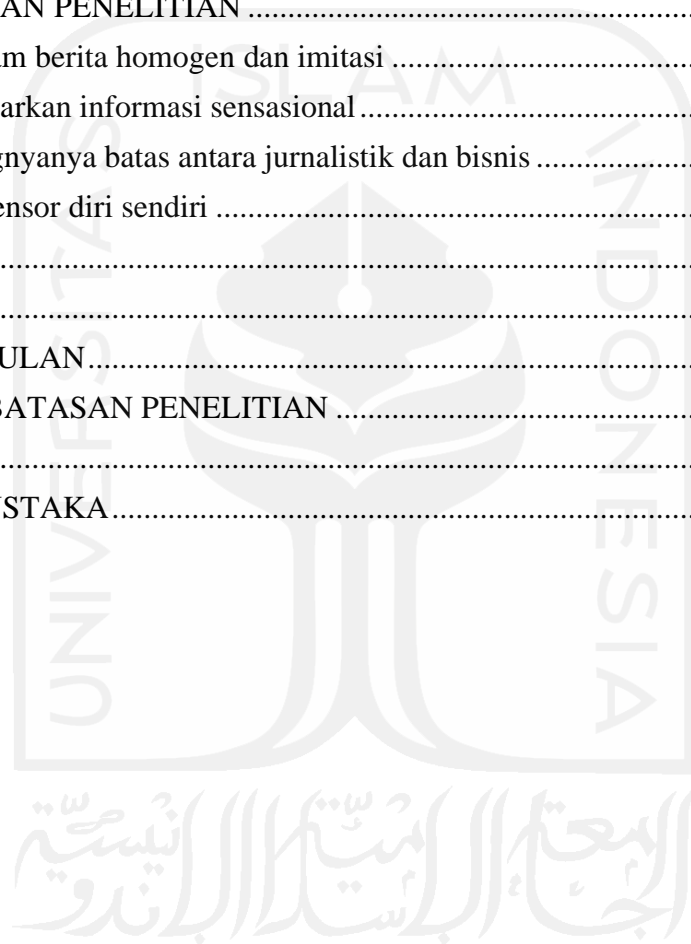
8. Vellya dan Farah yang tidak pernah diragukan kemampuannya, trimakasih sudah membantuku mendapatkan nilai-nilai bagus diperkuliahan. Kalian memang the best.
9. Teman-teman dekatku, Nanda, Mbut, Nopan, Jogi, Tio, Vindo, Akmal, Emir, Tawang trimakasih telah mengisi hari-hariku. Semoga kalian sukses kedepannya.
10. Seluruh teman Komuniaksi 2016 “SATU AKSI SATU KOMUNIKASI!” Terimakasih kita sudah melangkah bersama. Semoga kita bisa bertemu dan bercerita lagi.
11. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga seluruh doa, dukungan, dan nasihat semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT. Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat berkembang dan berguna bagi semua pihak. *Aamiin Ya Rabbalalamin.*



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	8
PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. TINJAUAN PUSTAKA	12
F. KERANGKA TEORI	16
G. DEFINISI KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPRASIONAL	20
1. Definisi Konseptual.....	20
2. Defini Operasional	22
H. METODE PENELITIAN.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Waktu dan Lokasi Penelitan.....	23
3. Populasi, Sample, dan Teknik Sampling.....	24
4. Jenis Data	24
5. Pengumpulan Data	25
6. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	25
7. Hasil Uji Reliabilitas	27
I. JADWAL PENELITIAN	28
1. Perencanaan.....	28
2. Pengumpulan Data	28
3. Pengerjaan Penelitian	28
BAB II.....	29
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	29
A. SEJARAH EKONOMI POLITIK.....	29
B. EKONOMI POLITIK DI MEDIA	30
C. KALTIM POST	31
BAB III	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
1. Jumlah narasumber	36

2. Posisi halaman berita isu pembangunan daerah.....	38
3. Cakupan berita	40
4. Jumlah berita pembangunan dalam sekali terbit koran Kaltim Post.....	41
5. Panjang berita isu pembangunan daerah.....	42
6. Tema berita isu pembangunan daerah.....	44
7. Sumber berita isu pembangunan daerah	46
8. Subjek berita isu pembangunan daerah.....	48
9. Keberpilihan isi berita isu pembangunan daerah	50
10. Isi berita isu pembangunan daerah.....	52
PEMBAHASAN PENELITIAN	54
1. Program berita homogen dan imitasi	59
2. Menyiarkan informasi sensasional	59
3. Hilangnya batas antara jurnalistik dan bisnis	59
4. Menyensor diri sendiri	60
BAB IV	68
PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. KETERBATASAN PENELITIAN	69
C. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ekonomi politik dapat dipahami sebagai istilah kolektif untuk teori dan pendekatan yang menekankan perlunya menganalisis keterkaitan antara proses ekonomi dan keadaan politik tertentu. Schubert & Klein dalam Hardy (2014) Mengatakan bahwa ekonomi politik memiliki keterkaitan antara proses ekonomi dan keadaan politik tertentu. Ekonomi politik kerap dikaitkan dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Staniland dalam Deliarnov (2006:8-15), studi ekonomi politik mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, meliputi hubungan yang melibatkan ilmu ekonomi dan politik. Makna ekonomi politik kerap tertukar atau dinilai sama dengan istilah politik ekonomi. Tetapi pada dasarnya ekonomi politik dan politik ekonomi memiliki makna yang sangat jauh berbeda. Staniland berpendapat bahwa metode analisis politik ekonomi digunakan untuk memahami permasalahan ekonomi dengan strategi yang bermula dari teori politik. Disisi lain ekonomi politik digunakan untuk memahami permasalahan-permasalahan politik dengan pendekatan teori ekonomi. Oleh sebab itu, konsep kebijakan publik memiliki kaitan yang sangat erat dengan ekonomi politik. Hubungannya adalah disiplin ilmu ekonomi politik digunakan untuk membahas hubungan antara berbagai aspek baik proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi. Deliarnov (2006:8-15)

Praktik ekonomi politik dapat dijumpai dalam beberapa sektor, contohnya sektor media dan konten media. Ekonomi politik merupakan penghampiran kritik sosial yang fokusnya kepada hubungan antara struktur ekonomi, dijuluki industri media dan konten ideologis media. (McQuail, 2011:105) Dari definisi tersebut maka media seperti penggalan dari sistem ekonomi yang hubungannya erat dengan sistem politik.

Pada masa Orde Baru, perusahaan media banyak mengalami perubahan. Mulai dari aspek industrialisasi media hingga pada relasi antara media dengan institusi diluar media (pemerintah). Pemerintah daerah memiliki hubungan yang sangat terikat dengan media lokal. Pertumbuhan provinsi dan kabupaten kota baru sering bersamaan dengan perluasan jaringan media masa. Adanya perluasan

jaringan media masa nasional ke media masa local membentuk pasar baru yakni institusi pemerintah daerah. Strategi media masa local menjadikan pemerintah daerah sebagai sumber berita sekaligus pasar media. Kerjasama antara media masa local dengan pemerintah daerah adalah dalam bentuk publikasi kegiatan dan kinerja pemerintah daerah yang dimuat pada halaman koran dalam waktu yang berkala. Melalui bentuk pemasaran seperti itu, media memposisikan diri sebagai pihak penyambung antara pemerintah dengan masyarakat sekaligus memperoleh pendapatan dari pemerintah daerah. (Mukhijab, 2015:104-109)

Ekonomi politik media terkait dengan masalah modal dari pemilik modal yang berjalan dalam bidang industri media. Pihak pemilik modal membuat media sebagai bisnis untuk mendapatkan laba, yang keuntungan tersebut digunakan kembali untuk mengembangkan bisnis medianya. Sehingga pengumpulan keuntungan itu dapat menjadikan kepemilikan media semakin berkembang pesat. Terdapat tiga hal mendasar dalam teori ekonomi politik, yaitu berfokus pada bagaimana media dibentuk dan dikelola, menawarkan penyelidikan empiris yang berkaitan dengan persoalan financial atau keuangan media, serta mencari kaitan antara proses produksi media dengan keuangan media (Barant, 2010:263).

Ekonomi politik media berfokus pada media dan budaya massa. Seringkali keduanya dihubungkan dengan persoalan-persoalan sosial terkini atau yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan begitu, teori ini dapat dikatakan sebagai penentu dari berbagai macam permasalahan yang dilakukan oleh praktisi media untuk dapat menentukan kemampuan melawan kekuasaan yang sedang mapan. Dalam hal ini, penguasa lah yang menentukan segala proses produksi konten yang dilakukan oleh para pekerja media, sehingga status quo dapat meningkat. Oleh karena itu, menghambat berbagai macam cara yang diusahakan untuk menghasilkan adanya perubahan sosial yang membangun. Namun, para pemilik modal menggunakan cara yang sangat bertolak belakang dengan teori ekonomi politik yang aktif demi mencapai perubahan sosial yang konstruktif. Adanya perubahan sosial sebenarnya didapatkan apabila media memberikan informasi atau berita yang menunjukkan pemahaman kepada masyarakat.

Pada dasarnya, media harus menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau mengutamakan transparansi dalam menyampaikan

informasi. Media massa sangat berpengaruh terhadap penyebaran informasi, terlebih mengenai isu pembangunan daerah yang ditujukan untuk masyarakat. McQuail dalam Susanto (2014:584) mengatakan bahwa “media beroperasi di ruang public sesuai kepentingan pengguna, kegiatan utamanya adalah memproduksi, mendistribusikan konten simbolik, dan partisipasi bersifat profesional, terarah serta bebas nilai kepentingan”. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah media yang bebas dari berbagai pengaruh seperti kekuatan social, ekonomi, maupun politik dan lebih mengedepankan kejelasan informasi kepada khalayak. Namun praktiknya media menjadi mesin pencetak uang dan modal, tak ubahnya seperti lembaga-lembaga bisnis yang lain.

Herman dan Chomsky dalam *Manufacturing Consent* (2002:12) menjelaskan mengenai praktik ekonomi politik media :

”Structural factor are those such as ownership and control, dependence on other major funding sources (notably, advertisers), and mutual interests and relationships between the media and those who make the news and have the power to define it and explain what I means.”

Dalam kutipan tersebut Herman dan Chomsky mengatakan bahwa sumber daya pendanaan utama (pemilik dana atau orang-orang yang ingin memasang iklan) memiliki timbal balik antara media dengan orang-orang atau instansi yang ingin dimuat iklan atau beritanya. Kutipan tersebut sesuai dengan praktik media di Indonesia saat ini. Dimana pemilik modal dapat mengatur proses pembuatan konten pada media massa. Sehingga menghalangi pola komunikasi antara media dengan khalayak yang seharusnya bersifat transparan.

Media banyak memberikan konten sesuai dengan keinginan pemilik modal guna membentuk opini positif masyarakat. Konten tersebut dapat berupa pemberitaan mengenai isu pembangunan daerah hingga iklan-iklan daerah. Isu pembangunan bisa dikatakan sebagai suatu perubahan dalam makna structural, yaitu perbaikan dalam unsur ekonomi masyarakat yang mencakup perubahan pada perbandingan-perbandingan kondisi yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi (Sumirto D:1994). Isu pembangunan daerah kemudian dijadikan sebagai isu utama dalam pemberitaan. Pembangunan daerah dianggap menjadi sebuah pencapaian luar biasa yang mampu menaikkan citra pihak-pihak tertentu.

Perkembangan isu ini menimbulkan pertanyaan mengenai praktik-praktik bisnis yang dilakukan para pemilik modal. Berawal dari itu kiranya perlu pembahasan lebih dalam mengenai pengaruh kepemilikan modal terhadap pemberitaan di media. Bagaimana ekonomi politik dan isu-isu pembangunan daerah di media Kaltim Post? Mengingat salah satu peran media adalah mengkritisi kerja pemerintah dalam pembangunan daerah. Pemilihan media lokal yakni media daerah Kaltim Pos. Pemilihan media Kaltim Pos dilatarbelakangi oleh adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Nielsen tentang belanja iklan pada tahun 2015 yang lalu menunjukkan bahwa tren belanja iklan di media cetak khususnya koran didominasi dari iklan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut membuktikan dari produk yang beriklan paling banyak dikoran sepanjang 2015, delapan di antaranya adalah iklan dari Pemerintah Daerah, sisanya adalah brand komersial. Belanja iklan pemerintah daerah peringkat tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Riau yang menghabiskan Rp 569 miliar pada tahun 2015, disusul Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menghabiskan Rp 534,8 miliar. Dibandingkan dengan tahun lalu, keduanya mengalami peningkatan masing-masing sebesar 22% dan 72%. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa investor atau pemilik modal menentukan sebuah konten di media massa.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Ekonomi Politik Isu-Isu Pembangunan Daerah di Media Kaltim Post?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk menganalisis lebih jauh bagaimana ekonomi politik di pemberitaan pembangunan daerah Kaltim Post

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis untuk dijadikan pijakan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis:

a) Membantu masyarakat agar lebih mawas terhadap praktik ekonomi politik

- b) Membantu masyarakat agar memahami bagaimana objektifitas media dalam memberitakan sebuah berita

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pertama adalah Penelitian oleh Muhamad Sulhan dengan judul Kisah Kelabu di Balik Maraknya Pers Lokal di Kalimantan (2006). Penelitian ini membahas mengenai media lokal yang belum bisa dikatakan independen atau berdiri sendiri dikarenakan hampir semua media lokal telah dikendalikan oleh media-media pusat. Media yang awalnya dibuat untuk masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasinya untuk pemerintah dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, malah beralih fungsi sebagai alat untuk memperkaya pemerintah. Contohnya, Jawa Pos yang memperluas jaringan media daerah Kalimantan Tengah dengan cara berkerja sama dengan media lokal. Media lokal dan media pusat bersama-sama mencari tujuan yang sama agar saling menguntungkan satu sama lain.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, media lokal menjadi tangan kanan media nasional. Yang pada dasarnya tidak mempunyai idealisme dan konsistensi atas menyampaikan kebenaran. Media ini hanya mengabdikan kepada pemilik modal dan mendewakan pemberi uang dalam pembuatan beritanya. Media hanya seperti humas sebuah instansi pemerintah daerah. Media yang seperti ini memiliki ciri yang setiap halamannya dipenuhi dengan rangkaian kegiatan bupati dan pemimpin daerah tanpa mau peduli dan kritis kepada kondisi masyarakat setempat.

Kedua adalah penelitian oleh I Gusti Ngurah Putra dengan judul Ketika Watchdog Dipelihara Para Juragan: Kontrol Pengusaha Terhadap Media Massa (2008). Penelitian ini membahas mengenai media massa Indonesia yang kini berada dalam bahaya. Media masa yang terjebak disituasi dimana harus berpihak terhadap masyarakat atau mendukung keberadaan para elit-elit politik atau pemilik modal. Tetapi faktanya saat ini kebanyakan media massa telah dikendalikan oleh mereka paara konglomerat. Bisa dilihat dari konten-konten yang membagus-baguskan berita elit-elit tertentu atau pemilik modal dimata publik.

Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa media dijuluki sebagai watchdog (anjing pengawas), karena media seharusnya bertujuan untuk

memantau orang-orang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang politik atau pemerintah. Hal ini dilakukan agar pemerintah mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya. Para juragan atau para pemilik modal berkepentingan untuk mempengaruhi isi media bukan saja dalam usaha agar mereka lebih cepat memperoleh profit yang telah mereka investasikan, tetapi juga untuk tujuan-tujuan yang lebih luas seperti mempengaruhi kebijakan public baik dari tahap agenda building isu kebijakan sampai pada tahap implementasi kebijakan public.

Kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah media yang sudah beralih fungsi menjadi anjing penurut yang selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh para pemilik modal atau elit-elit tertentu karena merekalah yang menghidupinya.

Ketiga adalah penelitian oleh Desliana Dwita dengan judul Televisi dan Kepentingan Pemilik Modal Perspektif Teori Ekonomi Politik Media (2014). Karya ilmiah ini mencoba mengamati segala peristiwa yang terjadi di televisi, dimana televisi memainkan peran penting dalam proses demokratisasi negara. Pada kasus menjelang pemilihan Presiden Republik Indonesia beberapa waktu silam, media televisi memusatkan perhatian publik dengan sajian kegiatan kampanye dan berbagai informasi mengenai pasangan calon presiden beserta isu-isu politik lainnya. Jika dilihat dalam sudut pandang demokrasi, media televisi merupakan sebuah media yang memiliki peran sebagai penyangga, dimana televisi dapat memberikan berbagai macam informasi politik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membentuk pandangan mereka tentang para paslon, pun dapat menentukan pilihannya. Pada proses demokratisasi, opini publik Indonesia sangat bergantung pada program berita yang disiarkan oleh stasiun TV guna mengetahui cara Indonesia menjadi negara demokrasi. Budaya informasi yang dikembangkan oleh media televisi harus lebih difokuskan pada pemajuan demokrasi dan menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab.

Dalam penelitian ini dikatakan bahwa metode ekonomi politik media menekankan pada eksistensi masyarakat kapitalis dalam bentuk corak produksi dominan yang mengkonstruksi sistem dan praktek berdasarkan logika modifikasi dan akumulasi modal. Dalam pemahaman ini, metode ekonomi politik cenderung tidak hanya melibatkan masalah ekonomi, tetapi

juga hubungan antara ekonomi politik, teknologi dan dimensi budaya dari realitas sosial. Dalam industri pertelevisian, hubungan antar agen berperan penting dalam menyesuaikan konten televisi untuk memenuhi kepuasan pribadi agen.

McQuail (dalam Dwita, 2014) mengatakan bahwa isi media dapat dipengaruhi oleh kekuatan yang mana juga mempengaruhi pengelola media. Adapun pihak-pihak yang paling berpengaruh dalam hal tersebut, yaitu manajemen, profesional media, dan pendukung teknologi. Ketiga pihak ini selalu berupaya membuat keputusan ditengah berbagai hambatan untuk memasukan kekuasaan kedalam pengelola media. Informasi atau konten pada media merupakan hasil keputusan antara program internal, manajerial, editorial, serta pengaruh pihak luar yang asaknya dari sumber-sumber nonmedia, yaitu pihak yang berpengaruh dalam kegiatan sosial, pemasang iklan, serta pejabat pemerintah.

Kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah televisi merupakan media dalam bentuk komunikasi massa yang paling besar pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik. Oleh karena itu televisi memiliki peran penting pada saat proses demokratisasi sebuah negara. Namun untuk saat ini televisi tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan benar. Media televisi malah lebih terlihat ditunggangi oleh elit-elit politik, dan menjadi kekuatan demokratik. Dengan kata lain, media menjadi alat untuk kepentingan-kepentingan pemilik modal, elit negara, dan kelompok tinggi lainnya.

Keempat adalah penelitian oleh Andrea Prat dengan judul *The Political Economy of Mass Media* (2011). Penelitian ini membahas tentang literatur ekonomi politik yang berkembang tentang pengaruh media massa pada politik dan kebijakan. Mencakup teori dan empiris, diatur dalam empat tema utama yaitu, transparansi, penangkapan, liputan informatif, dan bias ideologis.

Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa terdapat dua cara untuk media menghasilkan pendapatan, yang pertama yaitu berasal dari pendapatan komersil. Maksud dari pendapatan komersil adalah pendapatan yang berupa peningkatan penjualan dan berlangganan surat kabar, kenaikan biaya iklan dan kabel untuk stasiun tv. Yang kedua yaitu imbalan atau suap untuk media dari politisi yang berkuasa. Politisi yang berkuasa memberikan penawaran

kepada media mengenai pemberitaan positif terhadap politisi tersebut. Jika media menerima penawaran, media berkomitmen untuk terus menekan sinyal negative (pemberitaan negative terhadap politisi yang bersangkutan). Dalam jurnal tersebut peneliti juga mengatakan bahwa politisi yang berkuasa tahu tentang keberadaan sinyal negative seperti itu ketika ia mengajukan penawaran terhadap media.

Kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah meskipun ekonomi politik media massa masih merupakan bidang yang masih muda, sebagian besar karya di bidang ini telah diterbitkan setelah tahun 2000, sejumlah hasil yang menarik telah muncul. Terkait, pengaruh posisi ideologis media terhadap perolehan informasi dan akuntabilitas tidak jelas. Jika bias muncul melalui disinformasi dengan motif mempengaruhi pemilu atau keengganan untuk meliput berita buruk tentang calon pemilih yang disukai, perolehan informasi akan berkurang. Di sisi lain, jika bias muncul karena media meliput isu dan fakta yang menjadi perhatian audiensnya, dan memberikan rekomendasi dari posisi politik yang sama dengan audiensnya, maka bias ideologis dapat meningkatkan perolehan informasi.

Kelima adalah penelitian oleh Yusuf Yuksel dengan judul *An Analysis of The Media and Government Relationship* (2013). Artikel ini menganalisis hubungan antara media dan pemerintah. Pemahaman tentang dinamika hubungan ini penting karena berimplikasi pada informasi yang diperoleh dan demokrasi yang kuat. Untuk tujuan ini, berbagai sistem media, teori dan pendekatan (model cascade, pendekatan pengindeksan, teori propaganda dan perspektif hegemonik) dibahas dalam kaitannya dengan hubungan media-pemerintah. Jelas bahwa derajat komersialisasi, paralelisme politik, dan norma profesionalisme jurnalistik dalam sistem media yang berbeda memengaruhi derajat dan sifat hubungan ini.

Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa komersialisasi (pengembangan pasar media) membahas transformasi media sebagai entitas komersial yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan memberikan informasi dan hiburan kepada individu. Orientasi keuntungan, kekuatan penyiaran public, tren kepemilikan media dan deregulasi kepemilikan media adalah beberapa hal penting yang membahas kisaran komersialisasi dalam system media. Komersialisasi media telah mengubah

kondisi politik, praktik jurnalisme, dan peran media dalam system dalam kaitannya dengan pemerintah, dan system ekonomi.

Dalam jurnal ini juga mengatakan bahwa media adalah bagian penting dari system politik dan sosial apapun. Mereka menginformasikan, menghibur, mendidik, dan menanamkan orang dengan kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat dan mengintergrasikan mereka ke dalam system. Penelitian ini juga mengatakan bahwa media menyediakan ruang untuk debat dan serangkaian saluran untuk politis, kandidat, partai politik, kelompok kepentingan dan public serta sarana publisitas dan pengaruh bagi para actor ini. Disatu sisi, pemerintah pasti membutuhkan legitimasi untuk tindakan mereka yang membutuhkan pembenaran atas tindakan mereka di depan umum. Mereka perlu menumbuhkan citra positif untuk mendapatkan keuntungan terhadap lawan mereka, memenangkan persetujuan public dan mendapatkan kekuatan politik dengan menggunakan media. Pada titik ini, media tidak beroperasi sebagai actor yang sepenuhnya independen. Ia memiliki hubungan timbal balik dengan pemerintah yang tentu saja memengaruhi manajemen berita dan informasi yang didapat public.

Kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah meskipun sebagian besar ahli menegaskan bahwa publik tidak mendapat informasi yang baik pada saat perang dan konflik internasional, masih ada beberapa alasan untuk harapan seperti yang dikemukakan oleh model tersebut. Jika di sisi media telah disediakan counter frame, maka publik memiliki peluang yang lebih besar untuk mengkonstruksi pendapatnya sendiri. Selain itu, media baru Internet tentunya telah memberikan saluran informasi baru, jaringan informasi baru (global, lokal) dan bingkai yang tidak mudah dikendalikan oleh pemerintah dan media besar yang kuat.

F. KERANGKA TEORI

Media sebelum era reformasi cenderung digunakan sebagai alat untuk mengubah pandangan khalayak dan sebagai instrument politik pemerintah. Akan tetapi, pada saat ini banyak media massa yang menerapkan atau melimpahkan kebebasan dalam pemberitaan dan penyiaran. Jika dilihat dalam perspektif pers, media merupakan sebuah alat kekuasaan negara yang digunakan demi mendukung program pemerintah. Pun jika diperhatikan,

media massa justru terlihat sama atau sejalan dengan model pers pembangunan. Dalam model media pembangunan, informasi akan lebih membaur melalui control yang berlapis dari pemerintah. Dimana informasi yang diberikan cenderung sejalan dengan pemerintah. Seperti yang diungkapkan Herman dan Chomsky dalam Manufacturing Consent(2002) bahwa sebuah model propaganda berfokus pada ketimpangan kekayaan dan kuasa, serta efek bertingkat pada kepentingan yang menjadi pilihan media massa. Hal ini mengakibatkan pemberitaan pada media massa dikenal dengan kemauan politik pemerintah atau pemegang kekuasaan (Sjafari, 2012).

Ekonomi politik menurut McChesney (1998a:8) dalam Rianto (2005) merupakan bidang kaji yang menyajikan kritik normatif yang kuat melalui mana kebijakan negara dan dengan metode seperti apa yang dimiliki, dikelola, disubsidi oleh media yang memberikan pengaruh kemampuan media dalam melayani, sebagaimana dengan apa yang ia sebut *democratic finction*.

Menurut Eatwell, Milgate and Newman,1987:907 dalam Mosco (22:1996) mengatakan bahwa :

From conceptual point of view, "political economy is the science of wealth and deals withefforts made by man to supply wants and satisfy desires." Before political economy became a science, it served as the intellectual description for asystem of production, distribution, and exchange.

Kutipan diatas menjelaskan bahwa ekonomi politik sebenarnya adalah merupakan sebuah ilmu tentang kekayaan yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan manusia untuk terus memenuhi keinginannya. Mosco juga menekankan bahwa sebelum ekonomi politik menjadi sebuah ilmu, ekonomi politik ini berhubungan dengan system produksi, distribusi dan pertukaran. Oleh karenanya Mosco (1996) kemudian mendefinisikan ekonomi politik sebagai sebuah ilmu yang berkaitan dengan hubungan sosial, khususnya kekuasaan yang saling membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya.

Vincent Mosco dan Andrew Reddick dalam Rianto (2005) menyatakan bahwa studi ekonomi politik dengan konsisten diposisikan dalam baris terdepan untuk kemudian dapat memahami tentang segala perubahan sosial dan juga transformasi historis. Menurut McMchesney, ada dua pendekatan ekonomi politik. Pertama, pendekatan ekonomi politik diarahkan pada usaha

mencari penjelasan hubungan-hubungan alamiah antara media dengan sistem komunikasi, sementara pada sisi yang lain sistem komunikasi dengan struktur sosial masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, pendekatan ini menjelaskan bagaimana media dan sistem komunikasi dan isi media agar mempengaruhi relasi sosial yang ada. Kedua, ekonomi politik melihat secara khusus bagaimana kepemilikan, mekanisme pendukung, seperti iklan, dan kebijakan pemerintah berpengaruh pada perilaku dan isi media.

Ekonomi politik media sama halnya seperti mengikuti rute bagaimana uang dan keberpihakan dapat menentukan dan menyaring berita yang diinginkan, menyatukan pendapat, dan mengutamakan kepentingan pemerintah dan swasta yang dominan, untuk membuat publik menerima pesan tersebut. Herman dan Chomsky dalam *Manufacturing Consent* (2002:12) menjelaskan mengenai praktik ekonomi politik media :

”Structural factor are those such as ownership and control, dependence on other major funding sources (notably, advertisers), and mutual interests and relationships between the media and those who make the news and have the power to define it and explain what I means.”

Dalam kutipan tersebut Herman dan Chomsky mengatakan bahwa sumber daya pendanaan utama (pemilik dana atau orang-orang yang ingin memasang iklan) memiliki timbal balik antara media dengan orang-orang atau instansi yang ingin dimuat iklan atau beritanya.

McQuail menjelaskan bahwa sebenarnya kekuatan media masa adalah dapat mengarahkan maupun mengubah opini dan kepercayaan publik, mempengaruhi sikap, menciptakan realitas, memberikan status dan legitimasi, serta dapat pula menyebarluaskan informasi dengan cepat dan dalam waktu yang bersamaa (dalam Dwita, 2016: 254).

Teori ekonomi politik media menitikberatkan pada media massa dan budaya massa yang keduanya terkait dengan sejumlah isu sosial yang terjadi di masyarakat. Teori tersebut berfokus pada pembatasan atau hambatan yang diberlakukan oleh praktisi media yang mengurangi produksi konten pekerja media. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk melakukan perubahan sosial yang konstruktif ditunda. (Sucahya, 2013: 17)

Puji juga mengatakan media dianggap sebagai institusi ekonomi, dan produk jurnalisme sebagai bagian penting output media yang bernilai

ekonomi, dan karenanya harus menghasilkan keuntungan. Itu sebabnya muncul lah market-driven journalism. Terdapat tiga ciri penting yang dimiliki market-driven journalism menurut McManus. Pertama, memaksa stasiun-stasiun untuk mengumpulkan informasi dengan narasumber yang terbatas guna mendapatkan keuntungan. Sehingga, terkesan memberikan informasi yang monoton. Kedua, para produser berita bertanggung jawab atas liputan yang seragam. Ketiga, elite politik memiliki kuasa yang dapat menentukan peliputan berita, pemilihan, dan pelaporan. Dalam market driven journalism, masyarakat dianggap sebagai customer dan bukannya warga negara, dan karenanya jurnalisme diorientasikan untuk melayani pihak tertentu melainkan melayani warga negara secara keseluruhan.

McManus (1994:78) mengungkapkan bahwa market-driven journalism mengikuti pemikiran pasar untuk menciptakan suatu wadah yang mendukung iklan yang diarahkan pada target tertentu. Media menerapkan poin-poin penting tertentu untuk meliput isu atau peristiwa yang ditargetkan untuk menarik perhatian publik. Sorotan ini mencakup frekuensi pelaporan masalah dan insiden tertentu dan cara melaporkan masalah atau insiden tersebut. Dalam media cetak daerah, yang menjadi isu utama adalah iklan daerah atau isu-isu mengenai pembangunan daerah setempat.

Prajarto dalam Larisu (2017:105) melihat bahwa keterlibatan media massa lokal dalam proses pembangunan daerah terlihat dari isi berita, dimana cenderung mengangkat tentang isu-isu pembangunan daerah. Dengan begitu, maka masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi isu-isu penting yang dihadapi, baik itu lampau maupun saat ini. Hal tersebut kemudian membantu dalam perumusan kebijakan pembangunan. Bintoro Tjokroamidjojo dalam buku yang berjudul “Konsep dan Teori Pembangunan” oleh Kartono dan Nurcholis menyatakan bahwa pembangunan merupakan sebuah usaha dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan pembangunan sebagai proses perubahan sosial, kesejahteraan ekonomi, modernisasi, wawasan lingkungan, pembangunan bangsa, dan juga peningkatan kualitas manusia.

Perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan baik adalah dengan adanya sistem keterbukaan, dimana masyarakatnya mendapatkan informasi baik mengenai perencanaan, proses, hingga hasil dan manfaat dari program

tersebut, maupun program-program pembangunan yang telah terlaksana. Pada saat itulah media massa melakukan perannya dengan menyebarluaskan informasi mengenai pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Alhasil, masyarakat dapat mengetahui secara rinci dan memiliki gambaran.

Begitupun halnya dengan media massa, dimana seharusnya dapat menerapkan nilai orientasi yang transparan dan memberikan manfaat faktual kepada masyarakat. Dengan tujuan menghilangkan stigma masyarakat terhadap media massa yang digunakan sebagai instrumen politik pemerintah dalam mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan (Sjafari, 2012).

G. DEFINISI KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPERASIONAL

1. Definisi Konseptual

Merupakan suatu unsur penelitian yang menjelaskan mengenai karakteristik permasalahan yang akan diteliti. Ekonomi politik adalah sebuah pendekatan kritik sosial yang berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi, konten ideologis media, dan dinamika industri media (McQuail, 2011:105). Definisi tersebut menyatakan bahwa media merupakan bagian dari sistem ekonomi yang mana sangat berkaitan dengan sistem politik, atau dapat dikatakan dengan adanya percampuran sistem politik di dalamnya. Ekonomi politik media terkait dengan masalah modal dari pemilik modal yang berjalan dalam bidang industri media. Pemilik modal memiliki kuasa dalam menentukan isi yang dimuat di media.

Jenis media terbagi menjadi dua, yakni media cetak dan media elektronik. Media cetak meliputi koran dan majalah. Sementara media elektronik meliputi televisi dan radio. Media cetak koran menjadi media cetak yang terus berkembang dari dahulu hingga sekarang. Meskipun minat khalayak kini telah bergeser pada media elektronik, namun media cetak seperti koran tetap memiliki eksistensinya tersendiri. Kaltim Post merupakan media cetak lokal daerah Kalimantan Timur. Kaltim Post memuat informasi seputar kehidupan sehari-hari, informasi sekitar serta berita terkini. Pemilihan media Kaltim Post menjadi objek penelitian

adalah dengan pertimbangan belanja iklan daerah pemerintah Kalimantan Timur yang terbilang cukup besar.

Peneliti memperdalam karakteristik berita mengenai pembangunan daerah di Kaltim Post pada bulan September - November. Guna memperdalam sebuah berita pembangunan daerah, peneliti menggunakan instrumen sebagai berikut :

- a. Jumlah narasumber untuk melihat terdapat berapa jumlah narasumber yang memberikan keterangan dan informasi pada sebuah berita pembangunan yang dimuat di Kaltim Post. Kemudian peneliti juga melihat apakah narasumber tersebut termasuk kedalam orang yang memiliki pengaruh atau tidak.
- b. Posisi halaman berita adalah untuk mengkategorikan apakah sebuah berita dimuat pada halaman depan, tengah atau akhir.
- c. Cakupan berita untuk melihat sebuah berita pembangunan termasuk pada lingkup wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan atau daerah dengan cakupan wilayah yang lebih kecil.
- d. Jumlah berita pembangunan dalam satu kali terbit koran adalah untuk melihat apakah berita pembangunan daerah pada sebuah koran mendominasi atau tidak.
- e. Panjang berita adalah jumlah paragraf sebuah berita. Peneliti ingin melihat apakah berita tersebut termasuk berita yang singkat, padat dan jelas atau berita yang panjang serta bertele-tele.
- f. Tema berita merupakan unsur utama dalam sebuah berita. Peneliti ingin melihat berita pembangunan yang dimuat dalam Kaltim Post didominasi dengan tema apa.
- g. Sumber berita adalah darimana sebuah berita berasal. Peneliti ingin melihat lebih jauh apakah berita tersebut didapatkan langsung oleh jurnalis atau melalui sumber yang lainnya.
- h. Subjek berita untuk melihat lebih jauh apa yang menjadi fokus pembahasan dalam berita. Peneliti membagi subjek berita menjadi tiga yakni masyarakat, pemerintah serta pemilik modal.
- i. Keberpihakan berita berhubungan dengan objektivitas media dalam memberitakan sesuatu. Peneliti ingin melihat apakah berita tersebut berpihak kepada salah satu pihak atau netral.

- j. Isi berita untuk menunjukkan berita yang dimuat lebih bersifat positif, negatif atau netral. Sebuah berita yang bagus baiknya memuat informasi yang netral, yakni memuat sisi positif sekaligus negatif.

2. Defini Operasional

Definisi operasional dapat dikatakan sebagai cara untuk melihat alat ukur sebuah variabel penelitian. Definisi operasional dapat melihat baik dan buruknya variabel penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Variabel		Definisi Variabel	Indikator
Ekonomi Media	Politik	Ekonomi politik media seperti melacak bagaimana uang dan kekuasaan menyaring dan mencetak berita yang dibutuhkan, meminggirkan perbedaan pendapat dan membiarkan kepentingan publik dan swasta yang dominan membuat informasi dapat diterima oleh publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Narasumber 2. Posisi halaman berita 3. Jumlah berita pembangunan daerah dalam satu kali terbit 4. Sumber Berita 5. Subjek Berita 6. Keberpihakan Berita 7. Isi Berita 8. Panjang Berita

Isu Pembangunan Daerah	Perbaikan dalam unsur ekonomi masyarakat yang mencakup perubahan pada perbandingan-perbandingan kondisi yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Berita 2. Tema Berita
------------------------	--	---

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan paradigma *Post-positivistik*, menerapkan strategi survey dan eksperimen, pertanyaan yang terbuka, data berupa angka dan analisis serta interpretasinya berbentuk statistik. Menurut Nurhidayah (2020) dalam Paradigma Post Positivisme mengatakan pasca positivisme adalah sekolah yang ingin mengoreksi kelemahan positivisme. Pada post-positivis secara empiris setuju bahwa realitas itu nyata dan ada menurut hukum alam. Namun di sisi lain, pada post-positivis percaya bahwa jika peneliti berada jauh dari realitas atau tidak berpartisipasi langsung dalam realitas, maka mustahil bagi manusia untuk memperoleh kebenaran dari realitas. Hubungan antara peneliti dan realitas harus bersifat interaktif, sehingga perlu digunakan prinsip triangulasi yaitu menggunakan berbagai metode, sumber data, data, dll.

Sebagaimana dijelaskan oleh Fluornoy (1989) dalam (Kurniawan, 2006:38) mengenai analisis isi:

“Analisis isi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi. Metode ini umumnya digunakan untuk mengetahui karakteristik isi pada surat kabar tentang frekuensi, volume yang berdasarkan dengan bidang masalah, penggunaan arah sumber informasi, dan kecenderungan isi berita.”

Rakhmat (1991) juga mengatakan bahwa metode analisis isi dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan pada isi komunikasi yang dihadirkan dalam bentuk lambang.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 bulan. Dalam proses pengumpulan data peneliti membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan. Selebihnya waktu peneliti gunakan untuk proses pengolahan data dan menyusun hasil serta pembahasan. Pengambilan data dilakukan secara manual oleh penulis melalui surat kabar Kaltim Post.

3. Populasi, Sample, dan Teknik Sampling

a) Populasi

Sugiono (2009) menjelaskan mengenai populasi:

“Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah media cetak Kaltim Post yang berjumlah 91.

b) Sample

Sample adalah sebagian dari keseluruhan jumlah populasi (Sugiyono, 2012). Sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 24 berita dari 91 populasi.

c) Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sample. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan sample secara manual. Sehingga, data dapat sekaligus dipilah antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai. Peneliti melakukan pencarian berita mengenai pembangunan daerah dalam surat kabar kaltim post. Kemudian peneliti mengambil 24 berita.

4. Jenis Data

Data primer adalah data utama yang dipegang oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah berita pembangunan daerah yang dimuat media cetak Kaltim Post. Peneliti mengambil berita pembangunan daerah pada bulan September-November dikarenakan adanya rencana pindahnya Ibu Kota baru ke Kalimantan Timur, setiap minggunya peneliti mengambil minimal tiga berita.

Data sekunder merupakan salah satu sumber data dan tidak akan langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui orang atau dokumen lain (Sugiyono, 2012: 137). Data pembantu dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh peneliti dari buku atau media pendukung lainnya.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan strategi survey sebagai teknik pengumpulan data. Definisi survey itu sendiri adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data yang sebagian besar datanya berupa variable, unit, ataupun individu dalam waktu yang bersamaan (Tika, 1997:29). Untuk pengumpulan data melalui individu digunakan untuk menggeneralisasikan terhadap objek yang diteliti. Variabel dapat berupa fisik ataupun sosial.

Dikarenakan data berupa berita yang berasal dari surat kabar Kaltim Post yang tidak memungkinkan untuk peneliti menemui jurnalis satu-persatu, maka survey dilakukan sendiri oleh peneliti berdasarkan data yang didapat melalui berita.

6. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Penelitian kuantitatif memiliki dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh instrument penelitian, yaitu uji Validitas dan uji Reliabilitas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2008:363) mengenai uji validitas:

“Uji Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan dalam sebuah penelitian. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada bagaimana suatu instrument dalam menjalankan tugasnya. Instrument dikatakan valid jika instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur.”

Pengujian validitas yang digunakan peneliti adalah dengan prinsip *eksperts judgement*. Peneliti meminta bantuan dan penilaian kepada Dosen Pembimbing untuk menelaah apakah instrument yang digunakan dapat

dikatakan valid atau tidak. Setelah dilakukan uji validitas dan dinyatakan valid, peneliti dapat melanjutkan penelitian sesuai dengan instrument yang sudah disusun.

Lalu ada uji reliabilitas. Instrumen bisa dikatakan reliabel pada saat instrument tersebut digunakan untuk mengukur objek yang sama berulang kali namun tetap menghasilkan hasil yang sama. Uji Reliabilitas yang digunakan peneliti adalah formula Holsti. Formula Holsti ini pertama kali diperkenalkan oleh R. Holsti. Relibilitas ini ditunjukkan dalam presentase persetujuan berapa besar presentase persamaan antara coder ketika menilai suatu isi (Eriyanto 2011:290). Berikut formula Holsti:

$$\text{Reliabilitas Antar-Coder} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan :

M = Jumlah coding yang sama

N1 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 1

N2 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 2

a. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah keseluruhan data sudah didapatkan tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Koding

Koding adalah sebuah tahap dimana data yang didapatkan diberikan kode tertentu untuk kemudian dimasukkan kedalam *coding sheet*. Koding diberikan dalam bentuk angka. Pada proses koding, peneliti memerlukan ketelitian agar tidak ada data yang keliru.

2. Tabulasi

Tabulasi adalah tahap dimana data yang sudah diberikan kode angka dimasukkan kedalam tabel. Tujuannya adalah agar data menjadi ringkas dan memudahkan dalam proses analisis. Proses pemindahan coding menggunakan program pengolah angka Microsoft Office Excel.

3. Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data masuk dalam tabel, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Program yang digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan pengolahan data adalah SPSS (Statistical Package for the Social Sciens). SPSS adalah sebuah program pengolah data yang memiliki analisis statistik yang cukup baik. Tujuan dalam menggunakan program SPSS adalah agar hasil yang didapatkan akurat.

Data kemudian diolah untuk mengetahui presentase yang didapatkan. Presentase akan didapatkan dalam bentuk tabel dan diagram. Melalui presentase ini peneliti dapat menelaah, meringkas dan menjelaskan data yang didapatkan secara deskriptif. Data dijelaskan secara detail untuk kemudian dikaitkan dengan teori atau penelitian terdahulu.

7. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sampel 10 berita pembangunan daerah dari total keseluruhan 24 berita pembangunan daerah. Penghitungan uji reliabilitas dilakukan sebanyak dua kali guna memastikan bahwa hasil yang didapatkan benar benar akurat. Berikut hasil uji reliabilitas peneliti:

Jumlah narasumber	Posisi halaman	Cakupan berita	Jumlah berita 1x terbit	Panjang berita
0,875	1	0,875	1	0,875

Tema berita	Sumber berita	Subjek berita	Keberpihakan berita	Isi berita
-------------	---------------	---------------	---------------------	------------

1	1	1	1	0,75
---	---	---	---	------

RATA-RATA

$$\frac{9,375}{10} = 0,9375$$

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas pada setiap point koding, maka jika dihitung rata-rata secara keseluruhan peneliti mendapatkan angka 0,9375. Angka tersebut membuktikan bahwa koding yang telah disusun oleh peneliti memenuhi syarat untuk dikatakan reliable.

I. JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan kurang lebih memakan waktu 13 bulan. Dimulai sejak bulan Agustus 2019 hingga September 2020. Tahap-tahap yang dilalui selama jangka waktu tersebut adalah:

1. Perencanaan
Perencanaan penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih empat bulan. Dimulai sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019.
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih selama tiga bulan. Dimulai semenjak September 2019 sampai dengan November 2019.
3. Pengerjaan Penelitian
Tahap pengerjaan penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih enam bulan. Dimulai semenjak April 2020 sampai dengan September 2020.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. SEJARAH EKONOMI POLITIK

Sebutan ekonomi politik sendiri pertama kali sudah muncul pada abad ke-16 yang ditulis oleh penulis Perancis bernama Antoyne de Montcheitein (1575-1621) dalam bukunya yang berjudul *Treaties on Political Economy*. Di abad ke-16 ini para ahli ekonomi politik membangun ide tentang dibutuhkannya peran negara untuk menstimulasi kegiatan ekonomi, yang disaat itu pasar belum berkembang seperti sekarang. Namun disaat akhir abad 18, penglihatan itu sedikit demi sedikit mulai berubah dan mulai di tolak, yang diyakini bahwa pemerintah sebenarnya tidak cocok untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi pemerintah malah menghalangi upaua untuk mendapatkan kesejahteraan.

Dalam Pengantar Ekonomi Politik oleh Sasmito dan Dyanasari (2018:23-24) menjelaskan bahwa ekonomi politik bermula pada abad ke 18, dengan filsafat moralnya. Dalam Bahasa Yunani *politik* memiliki arti pemerintahan dan *ekonomi* berarti manajemen rumah tangga. Pada mulanya ekonomi politik ini digunakan untuk mengolah administrasi negara. Sehingga ekonomi politik tidak dapat lepas dari pemerintahan. Ekonomi politik terus berkembang hingga pada akhir abad ke 19 istilah ekonomi politik lebih dikenal karena munculnya permodelan matematika oleh Alfred Marshall.

Karena perkembangan ilmu yang semakin dinamis, kini ekonomi politik tidak digunakan sebagai sinonim dari ekonomi. melainkan merujuk pada hal yang berbeda. Secara teoritis istilah ekonomi politik lebih merujuk pada ekonomi Marxian yang cenderung menerapkan pendekatan kepada masyarakat umum. Pada tahun 1970an merupakan tahun perkembangan ekonomi politik yang paling pesat, fokusnya lebih kepada model kebijakan ekonomi yang memaksimalkan ekonomi politik. Istilah ekonomi politik kemudian terus berkembang, hingga mulai dikenal di Indonesia pada dua dekade terakhir. (Sasmito dan Dyanasari, 2018:23-24)

B. EKONOMI POLITIK DI MEDIA

Studi ekonomi politik memiliki sifat yang sangat kompleks, sehingga dalam mempelajarinya diperlukan pandangan yang luas. Dalam melihat sebuah fenomena ekonomi politik diperlukan pemikiran yang kritis. Menurut Vincent Mosco ekonomi politik adalah sebuah kajian tentang relasi kekuasaan yang berdampingan mengolah produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya yang termasuk sumber daya komunikasi.

Dalam kaitan ekonomi politik dan media, media masa baik cetak maupun elektronik kerap menjadi sarana praktik ekonomi politik. “Media massa adalah kelas yang mengatur” dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa media masa bukan hanya sekedar media lalu lintas pesan dalam masyarakat. Lebih dari itu media masa mampu mengatur khalayak melalui pemaksaan kesepakatan oleh pihak yang dominan secara ekonomi dan politik. Selain mampu mengatur khalayak, media juga mampu mengabadikan pemilik modal atas publik yang diperlakukan seperti konsumen sembari menyusun regulasi-regulasi baru yang berpihak pada pasar. (Nashrudin, 2017:26)

McQuail kemudian mengeluarkan sebuah gambaran mengenai kondisi pada media masa yang menyatakan bahwa berbagai macam kekuatan yang mampu mempengaruhi perusahaan media ternyata juga sangat berpengaruh terhadap isi dari media tersebut. Terdapat tiga pihak yang sangat berpengaruh dalam perusahaan media, yakni pihak professional, manajemen dan pendukung teknik atau teknologi. Ketiga pihak ini berada dalam posisi yang cukup sulit, dimana mereka dituntut untuk membuat pilihan diantara tuntutan, halangan dan batasan untuk memberikan pengaruh dan kekuasaannya dalam perusahaan media. (Morrison, 2010:47)

Stephen Reese (1991) mengatakan bahwa isi media merupakan hasil dari tekanan yang muncul dari berbagai pihak baik dari dalam ataupun luar perusahaan media. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa isi atau konten dari media merupakan campuran antara keputusan internal perusahaan media (keputusan manajerial, program internet, editorial) dengan pihak non media (pihak yang memiliki kuasa secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan). Bisa dipastikan bahwa pemilik perusahaan media komersil mampu mengarahkan tenaga professional didalamnya untuk mengatur apakah isi media akan dimunculkan atau tidak.

Menurut Usman dalam Dwita (2004) terdapat empat teori ekonomi politik yang berhubungan dengan keberpihakan media yakni liberalisme modern, kapitalisme, libertarianisme dan sosialisme.

Liberalisme Modern adalah struktur ekonomi politik yang dianggap memiliki hal-hal yang terbaik diantara libertarianisme, kapitalisme dan sosialisme. Hal ini dikarenakan dalam liberalisme modern struktur ekonomi politiknya menyesuaikan dengan sistem kapitalisme, libertarianisme dan sosialisme.

Kapitalisme adalah teori ekonomi politik yang membebaskan individu atau korporasi bisnis untuk mengatur sumber-sumber kekayaannya. Dalam kapitalisme industri media dikuasai oleh pihak swasta. Sehingga, industri media bebas dalam mencari keuntungan setinggi-tingginya.

Libertarianisme merupakan teori yang menganggap bahwa kebebasan manusia dan peran pemerintah dalam mengatur media merupakan satu kesatuan yang penting. Teori ekonomi politik Libertarianisme mendukung bahwa kepemilikan media oleh pihak swasta perlu diatur dan dipantau oleh pemerintah agar persaingan antara perusahaan media berjalan secara sehat.

Sosialisme adalah sebuah teori ekonomi politik yang menyatakan bahwa pemerintah harus mengatur sumber kekayaan negara. Negara harus mampu mengendalikan perusahaan media agar tidak ada pertarungan antar perusahaan media.

C. KALTIM POST

Kaltim Pos didirikan pada tanggal 5 Januari tahun 1988 oleh Dahlan Iskan. Dahlan adalah salah satu entrepreneur media yang berasal dari Jawa Pos, Kaltim Post mulanya bernama ManuntunG. Munculnya koran ini adalah selain merupakan bagian dari ekspansi Jawa Pos Group ke berbagai wilayah di Indonesia, juga karena Kaltim merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat dinamis baik dari segi kependudukan maupun dari segi ekonomi. Pada tahun 1977, koran Manuntung berubah menjadi Kaltim Pos hingga sekarang. Kaltim Pos yang terbit secara harian memiliki ketebalan 36 halaman dan 60.000 (enam puluh ribu eksemplar) yang beredar di seluruh wilayah Kalimantan Timur, seperti Samarinda, Balikpapan, Berau, Tarakan, Sangata, Tenggarong, Bulungan, Kutai Kartanegara, dan lain-lain.

Seluruh aktivitas Kaltim Pos dirancang dari kantor pusat yang disebut "Kantor Biru" di Balikpapan yang didukung oleh kantor-kantor biro di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Alamat redaksi di Gedung Bim, Jalan Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan, sedangkan alamat kantor Biro Samarinda: Kompleks Mahakam Square, Jl. Untung Surapati Blok B No 5A Samarinda, diterbitkan oleh Duta Manuntung dan dicetak oleh PT. Percetakan Manuntung Press. Saat ini, Kaltim Pos mempekerjakan sekitar 150 orang personel yang terdiri dari redaksi-redaksi, wartawan, staf-staf redaksi, satpam dan sebagainya.

Aktivitas Kaltim Post saat ini bertumpu pada tiga hal yaitu redaksi, pemasaran, dan iklan. Sistem kerjaredaksi dimulai dari tujuh hal yaitu, pertama, rapatpemasaran; rapat ini memutuskan rubrik-rubrik, tema-tema yang akan diliput. Kedua, peliputan; merupakan penerjemahan dari rapat pemasaran. Ketiga, editing yang dilakukan di berbagai redaktur desk. Kelima, perwajahan. Keenam, film dan montase. Ketujuh, percetakan. Sistem kerja periklanan dimulai dari menentukan materi iklan, melakukan design iklan, mengolah perwajahan, pembuatan film dan montase, dan percetakan. Sementara sistem kerja pemasaran dimulai dari percetakan, ekspedisi, ke agen, ke loper-loper, selanjutnya ke para pelanggan atau pembaca.



Kaltim Post sebagai media masa local tentu saja selalu memberikan informasi yang terdepan. Kaltim Post selalu berinovasi mengikuti perkembangan teknologi.

Selain menyajikan berita dalam bentuk cetak, kini media Kaltim Post juga memberikan berita dalam bentuk digital. Berita digital tersebut disebut dengan Kaltim Post *e-paper*. Portal berita digital tersebut dapat diakses melalui epaper.kaltimpoost.co.id atau kaltim.prokal.co. Para pembaca hanya perlu mendaftarkan diri sebagai member untuk mendapatkan berita terbaru setiap harinya.



KALTIM POST
KALIMANTAN
KABUPATEN KOTA
MARTI, 17 SEPTEMBER 2017
HARGA Rp. 3.000

Masih Idola Bandar Raksasa

Bebas Narkoba di Kaltim Cuma Slogan, Banyak Tangkap Pelaku Baru

Chant Khusus dan Bendera Raksasa untuk Legenda

Kasus Narkoba di Polda Kaltim

NO	NO. KASUS	NO. TANGKAPAN	NO. PENGHUKUMAN
1	100	100	100
2	200	200	200
3	300	300	300
4	400	400	400
5	500	500	500
6	600	600	600
7	700	700	700
8	800	800	800
9	900	900	900
10	1000	1000	1000

ORANG LAGI MELAKSI

Angkapan orang-orang di Kota Balikpapan yang melakukan aksi melaksi di kawasan perkotaan. Aksi melaksi ini dilakukan dengan cara melampiaskan sampah ke sungai atau ke tempat-tempat umum lainnya.

Nasabah Harus Menolak, Berpotensi Pencurian Data Cabut Izin Penggesek Dua Kali

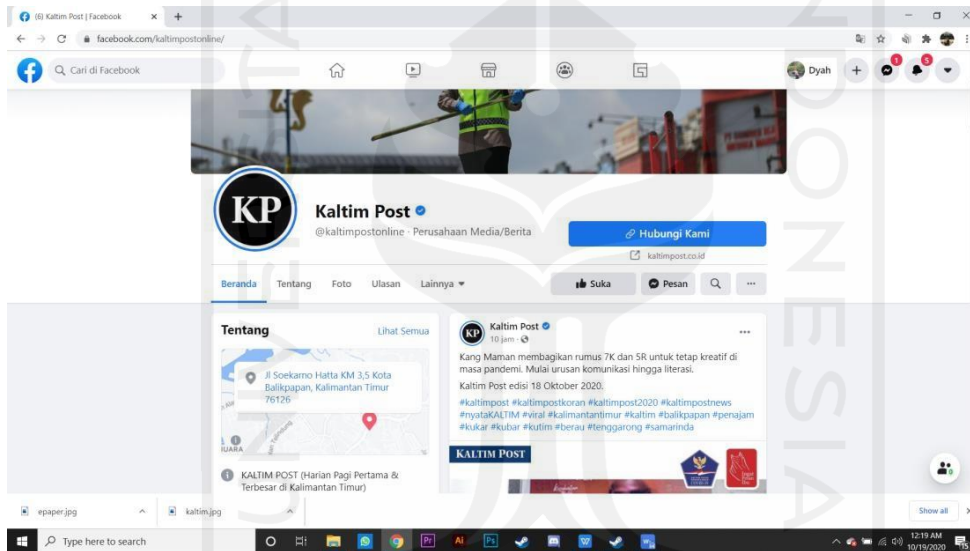
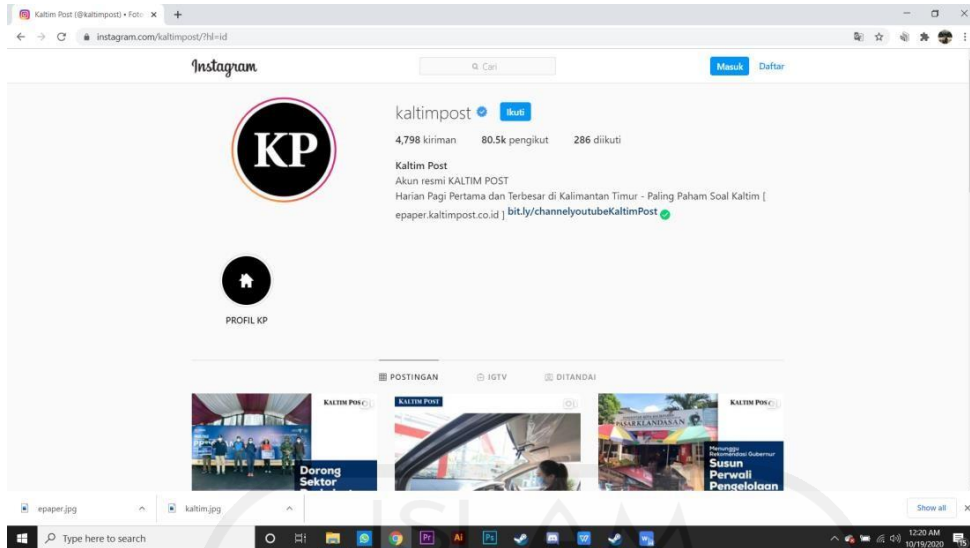
Bank Indonesia mengingatkan nasabah untuk selalu memeriksa data pribadi mereka secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mencegah pencurian data yang dapat merugikan nasabah.

Jetang Aek Skid Row di Pangung Rock In Borneo Dipadu Mamanda, Ada Gate Khusus bagi yang Mengenakan Pesapu

Untuk mempromosikan budaya musik rock di Kalimantan Tengah, Pangung Rock In Borneo mengadakan acara Mamanda. Acara ini diadakan di Pangung Rock In Borneo dan akan berlangsung pada tanggal 20 September 2017.

The screenshot shows the website interface with a search bar, navigation tabs for 'UTAMA', 'BALIKPAPAN', 'SAMARINDA', 'PRO BISNIS', 'KALTIM', 'OLAHRAGA', 'HIBURAN', 'LIFESTYLE', and 'KALTABA'. A featured article titled 'Diprodeo Cafe, Langkah Baru Lepas Melakikan Asimilasi - Dlayani Naps, Kopi Jery Bur Jadi Menu Andalan' is visible. The page also includes a 'TERPOPULER' section and a Creative Cloud advertisement.

Kaltim post juga berinovasi memberikan berita melalui media sosial. Kaltim Post memiliki akun resmi di beberapa media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram*. Media sosial Kaltim Post juga turut memberikan berita terkini. Dengan adanya media sosial tersebut akan sangat memudahkan pembaca untuk mendapatkan berita terkini. Cukup dengan bergabung atau mengikuti akun media sosial Kaltim Post.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jumlah narasumber

Narasumber bisa diartikan sebagai seseorang, bisa pribadi bisa juga sebagai lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas suatu informasi. Peneliti membagi jumlah narasumber menjadi tiga bagian, yaitu 1-2 orang, 2-4 orang, dan lebih dari 4 orang. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Narasumber	Jumlah	Presentase
1-2 Orang	14	58.3%
3-4 Orang	9	37.5%
Lebih dari 4 Orang	1	4.2%
Total	24	100.0%

Dalam tabel diatas menyatakan bahwa sebanyak 14 berita pembangunan daerah yang dimuat pada media Kaltim Post memiliki narasumber dengan jumlah 1-2 orang presentase 58.3%, narasumber 3-4 orang memiliki jumlah 9 berita pembangunan dengan presentase 37.5%, sedangkan dengan narasumber lebih dari 4 orang berjumlah 1 berita pembangunan dengan presentase 4.2%.

Jumlah narasumber dalam berita sebenarnya dapat mempengaruhi akurasi isi sebuah berita. Dari hasil penelitian yang didapatkan menjelaskan bahwa narasumber dalam berita pembangunan dimedia Kaltim Post memiliki jumlah yang sedikit. Setengah dari sample penelitian menyatakan bahwa dalam satu berita pembangunan hanya memiliki 1-2 narasumber. Dengan keterbatasan narasumber tersebut mengakibatkan adanya minim perspekif dalam berita. Mayoritas narasumber dalam berita adalah pejabat atau orang yang memiliki pengaruh besar dalam proses pemberitaan tersebut. Artinya lebih dari setengah berita pembangunan daerah yang ditampilkan di Kaltim Post informasinya didapatkan melalui narasumber yang terbatas dan orang-orang yang berpengaruh.

Peneliti mengambil tiga contoh berita pembangunan daerah untuk membandingkan antara narasumber yang jumlahnya sedikit dan minim perspektif dengan narasumber yang jumlahnya banyak dan memiliki berbagai perspektif.

Pertama, berita dengan judul “Baru Mulus 30 Persen Jalur Samboja-Petung 104 Km, Tahun Ini Dapat Perbaikan 5 Km” yang hanya memiliki satu narasumber yakni, Joniansyah selaku Kepala Seksi Jalan dan Jembatan UPT PU Kaltim Wilayah I. Dalam berita tersebut Joniansyah hanya menjelaskan mengenai perbaikan jalan yang terus ditingkatkan. Apa lagi dengan adanya rencana pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur diharapkan dapat membuat jalanan dikawasan tersebut semakin membaik. Disini narasumber hanya menjelaskan mengenai progres perbaikan jalan tanpa memberitahu apa saja kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perbaikan jalan, serta tidak adanya perspektif dari masyarakat yang merasakan dampak perbaikan tersebut.

Kedua, berita dengan judul “Bangun Ibu Kota, Perhatikan Kota Penyangga Agar Tidak Tertinggal, Peluang Proyek Tol Berlanjut ke Kalsel” yang memiliki tiga sampai empat narasumber yakni, Salman Lumoindong selaku Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Rizal Effendi selaku Wali Kota Balikpapan, Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan, dan Sukartiningsih selaku Kepala Pusat Rehabilitasi Hutan Tropis Universitas Mulawarman. Dalam berita tersebut narasumber mengatakan untuk tidak mengabaikan dan membuat rencana-rencana pembangunan untuk kota-kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan serta berharap agar kota-kota penyangga juga bisa mengimbangi ibu kota baru. Sama seperti berita sebelumnya, berita ini hanya memilih narasumber dari pihak pejabat saja, tidak menunjukkan dampak apa saja yang dihadapi jika rencana itu terus dilakukan.

Ketiga, berita dengan judul “Tanpa Tambang di Sekitar Ibu kota Negara Revisi RT RW, Legislatif Desak Pusat Buat Aturan Khusus” yang memiliki lebih dari empat narasumber yakni, Baharuddin Demmu selaku Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baihaqi Hazami selaku Kabid Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Kaltim, Isran Noor selaku Gubernur Kalimantan Timur, Sonny Wijaya selaku Kabak Perekonomian Setkab PPU, dan Ahmad Ramli selaku Dirjen Penyelenggara Post dan Informatika Kominfo. Dalam berita tersebut menjelaskan bahwa disekitar ibu kota baru nanti diharuskan untuk tidak berdekatan atau terbebas dari wilayah pertambangan. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat antara lima narasumber diatas. Setiap narasumber memiliki pandangannya masing-masing. Terdapat pro dan kontra mengenai wacana larangan pertambangan disekitar ibu kota baru.

Dengan beberapa contoh berita diatas, peneliti menyimpulkan bahwa berita yang baik adalah berita yang memiliki narasumber yang beragam. Karena narasumber yang beragam dapat memunculkan perspektif yang berbeda, sehingga berita yang dimuat bersifat netral dan tidak miskin perspektif.

2. Posisi halaman berita isu pembangunan daerah

Posisi halaman pada sebuah media cetak seperti koran dapat mempengaruhi atensi pembaca terhadap informasi yang disampaikan. Total halaman koran KaltimPost berkisar 36 halaman. Untuk mempermudah pembagian kelompok halaman peneliti membagi menjadi tiga bagian, yaitu halaman 1-10 (depan), 11-20 (tengah), dan 21-30 (belakang). Dalam penelitian ini jumlah dan presentase posisi halaman berita isu pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Posisi Halaman Berita	Jumlah	Presentase
1-10	17	70.8%
11-20	1	4.2%
21-30	6	25.0%
Total	24	100.0%

Tabel diatas menjelaskan bahwa dominasi berita isu pembangunan daerah dimuat pada posisi halaman 1-10 dengan jumlah berita yaitu 17 berita atau setara 70.8%, posisi halaman 11-20 memiliki jumlah 1 berita dengan presentase 4.2%, sedangkan posisi halaman 21-30 mendapati 6 berita dengan presentase 25%

Yang berarti kebanyakan berita pembangunan daerah yang dimuat oleh media Kaltim Post sengaja diletakkan dihalaman depan koran, untuk menarik perhatian pembaca. Berita yang berada dihalaman depan atau biasa disebut headline merupakan berita yang dianggap penting, eksklusif, menarik, dan tidak sensasional tapi dimuat secara dramatis.

Peneliti mengambil tiga contoh berita pembangunan dimedia Kaltim Post untuk membandingkan apakah berita yang berada dihalaman depan, tengah,

maupun belakang memiliki perbedaan cara penyampaian berita (eksklusif, menarik, serta dramatis).

Pertama, berita dengan judul “Perjuangkan IKN, Komisi VII Masih Gemuk” yang berada pada halaman satu dan bersambung pada halaman enam. Dalam berita tersebut jurnalis menuliskan judul yang menarik hingga menimbulkan rasa penasaran pembaca. Akan tetapi isi dari berita tersebut tidak semenarik judul dari berita itu sendiri. Isi dari berita tersebut hanya menjelaskan mengenai pembagian kursi pada komisi yang tidak merata. Bahkan isi dalam berita tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan “gemuk” yang ada didalam judul berita.

Kedua, dengan judul berita “Pemkab Prioritaskan Proyek Pengendali Banjir” yang berada pada tengah halaman tepatnya halaman 19. Menurut peneliti judul yang ada pada berita tersebut tidak memiliki unsur menarik karena judul tersebut dibuat dengan sangat sederhana dan tidak mempunyai kata-kata yang dramatis. Bahkan judul tersebut sudah menggambarkan isi dari berita. Dalam berita tersebut jurnalis menjelaskan bagaimana langkah pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir.

Ketiga, berita dengan judul “Masih Butuh Rp 30 Miliar Soal Pembangunan Poliklinik Rawat Jalan RSUD” yang berada pada halaman belakang tepatnya pada halaman 24. Judul dari berita tersebut menurut peneliti sangat menarik perhatian pembaca, karena jurnalis mencantumkan fakta mengenai kurangnya dana pemerintah untuk pembangunan. Isi dari berita tersebut menjelaskan fakta-fakta mengenai kekurangan dan pengeluaran dana serta progres pembangunan RSUD. Berita ini cenderung transparan dan jujur karena menampilkan fakta tanpa menutupi kekurangan pembangunan tersebut.

Garis besar yang didapatkan oleh peneliti dari contoh yang telah dipaparkan diatas bahwa berita utama atau headline seharusnya merupakan berita yang penting, eksklusif, dramatis, dan memiliki urgensi. Tetap pada kenyataannya hampir semua headline berita pembangunan tidak memiliki syarat-syarat tersebut. Headline yang ada pada berita pembangunan Kaltim Post memiliki judul yang menarik akan tetapi isi dari berita tersebut tidak semenarik dan sedramatis dengan apa yang ada didalam judul. Tak hanya itu, isi dari berita yang menjadi headline kebanyakan hanya memberikan komentar-komentar positif saja atau menjelaskan berita positif saja. Berbeda dengan berita yang terletak pada bagian tengah dan akhir dengan judul serta isi yang sebenarnya lebih penting dari berita headline.

Selain itu berita yang letaknya pada halaman akhir koran cenderung lebih transparan dan apa adanya.

3. Cakupan berita

Dalam sebuah berita tentu terdapat cakupan wilayah mengenai objek berita tersebut. Cakupan wilayah berita isu pembangunan daerah didalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian diantaranya ada provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Berikut adalah hasil penelitian dari cakupan berita:

Cakupan Berita	Jumlah	Presentase
Provinsi	8	33.3%
Kabupaten/Kota	13	54.2%
Kecamatan	3	12.5%
Total	24	100.0%

Tabel diatas menggambarkan bahwa berita isu pembangunan daerah memiliki lingkup wilayah paling banyak berupa kabupaten/kota dengan jumlah 13 berita setara dengan 54.2%, berita isu pembangunan daerah dengan lingkup wilayah provinsi berjumlah 8 berita setara dengan 33.3%, sedangkan berita isu pembangunan dengan lingkup wilayah kecamatan memiliki 3 berita setara dengan 12.5%.

Dari hasil diatas bahwa berita pembangunan daerah yang telah dimuat oleh Kaltim Post mayoritas memiliki cakupan wilayah kabupaten/kota. Dominasi berita pembangunan daerah dengan cakupan wilayah kabupaten/kota adalah sehubungan dengan rencana pindahnya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur khususnya Penajam Paser dan Kartanegara.

Peneliti mengambil contoh dari masing-masing cakupan wilayah, guna memberikan gambaran mengenai berita pembangunan ditiap wilayah cakupan. Pertama, dengan judul “Kaltim Berharap Banyak Proyek Strategis” yang bercakupan diwilayah provinsi. Dalam berita tersebut jurnalis mengatakan bahwa

Kalimantan berharap adanya proyek-proyek yang strategis untuk kenyamanan masyarakat di ibu kota baru kedepannya.

Kedua, yang berjudul “Ibu Kota Bikin Proyek Tol Bergairah” yang mencakup di wilayah kabupaten/kota. Dalam berita tersebut mengatakan bahwa pembangunan tol ini dipersiapkan untuk ibu kota baru agar masyarakat lebih mudah berpergian dan menghemat waktu. Akan tetapi proyek tol ini masih mengalami kemunduran dari jadwal lantaran dihadap sejumlah persoalan terutama penyediaan lahan.

Ketiga, berita dengan judul “Pembangunan Tetap Dilanjutkan” yang mencakup di wilayah kecamatan. Dalam berita ini dikatakan bahwa pembangunan ini sudah dinanti-nanti oleh banyak warga Sangatta. Sebagian besar warga Sangatta mendukung adanya pembangunan jembatan ini agar mempermudah warga untuk menyebrang. Karena beberapa narasumber mengatakan membayar ongkos penyebrangan ponton (kapal penyebrangan) lama kelamaan terasa berat. Tidak hanya itu, jembatan ini juga akan membantu masyarakat dikala hujan turun dan banjir melanda. Tetapi sebagian pekerja ponton protes dengan adanya jembatan ini. Mereka menganggap bahwa jembatan ini akan memangkas usaha mereka.

Peneliti menarik kesimpulan dari beberapa contoh yang sudah dipaparkan diatas bahwa hampir semua berita pembangunan daerah yang ada di Kaltim Post merupakan pembangunan-pembangunan untuk persiapan ibu kota baru. Dari semua berita pembangunan, kabupaten/kota memiliki berita paling banyak dikarenakan pemerintah ingin kota-kota penyangga bisa mengimbangi dan menyaingi ibu kota baru kelak. Pemerintah tidak ingin melihat kota-kota yang ada disekitar ibu kota nanti terlihat berbeda jauh dari ibu kota baru.

Peneliti tidak menemukan berita pembangunan daerah dengan cakupan wilayah kecamatan yang membahas mengenai pembangunan ibu kota baru. Berita pembangunan daerah dengan cakupan wilayah kecamatan lebih membahas mengenai pembangunan yang sifatnya tidak terlalu besar.

4. Jumlah berita pembangunan dalam sekali terbit koran Kaltim Post

Koran atau surat kabar tidak pernah lepas dari berita mengenai isu pembangunan daerah. Disini peneliti ingin mengetahui berapa jumlah berita isu pembangunan daerah yang dimuat pada koran Kaltim Post dalam sekali terbit.

Jumlah berita ini pun dibagi menjadi dua, diantaranya adalah 1-2 berita dan lebih dari 2. Hasil penelitian ini jumlah dan presentase jumlah berita dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Berita	Jumlah	Presentase
1-2 Berita	17	70.8%
Lebih Dari 2	7	29.2%
Total	24	100.0%

Tabel diatas menunjukkan hasil bahwa, dalam satu kali terbit koran Kaltim Post yang memuat berita isu pembangunan daerah sebanyak 1-2 berita memiliki presentase yang paling tinggi yaitu 17 koran setara dengan 70.8%, sedangkan yang memuat lebih dari 2 berita isu pembangunan daerah berjumlah 7 koran yakni setara dengan 29.2%.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa berita pembangunan dianggap penting dikarenakan banyaknya berita pembangunan daerah yang dimuat di Kaltim Post dalam sekali terbit. Banyaknya penerbitan berita pembangunan daerah di media Kaltim Post berhubungan dengan fakta bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Timur menghabiskan dana sebesar Rp 534,8 miliar untuk belanja iklan daerah. Fakta selanjutnya adalah meningkatnya belanja iklan pemerintah daerah disetiap tahunnya. Contohnya kenaikan belanja iklan pemerintah daerah pada tahun 2015-2016 sebesar 72%.

5. Panjang berita isu pembangunan daerah

Panjang berita dalam setiap berita isu pembangunan daerah selalu berbeda beda. Ada berita yang singkat, padat, jelas, dan ada juga berita yang panjang dan terlalu betele-tele. Oleh sebab itu peneliti membagi jumlah panjang berita menjadi tiga bagian, diantaranya adalah 1-10 paragraf, 11-20 paragraf, dan yang terakhir yaitu 21-30 paragraf. Jumlah dan presentase dapat dilihat pada tabel di bawah:

Panjang Berita	Jumlah	Presentase
1-10 Paragraf	15	62.5%
11-20 Paragraf	8	33.3%
21-30 Paragraf	1	4.2%
Total	24	100.0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa 15 berita isu pembangunan daerah atau setara dengan 62.5% memiliki panjang berita 1-10 paragraf , panjang berita 11-20 paragraf memiliki jumlah 8 berita isu pembangunan daerah dengan presentase 33.3%, dan panjang berita 21-30 paragraf memiliki jumlah 1 berita isu pembangunan daerah atau setara dengan presentase 4.2%.

Panjang dan pendeknya sebuah berita tidak berpengaruh pada kelengkapan isi berita. Tidak selalu berita yang mempunyai banyak paragraf mampu menjelaskan isi berita secara lengkap. Begitu juga sebaliknya, sedikitnya paragraf belum tentu memiliki isi berita yang tidak lengkap.

Peneliti mengambil tiga contoh berita pembangunan daerah yang dimuat oleh Kaltim Post untuk membandingkan apakah banyak dan sedikitnya paragraf berita mempengaruhi isi berita. Pertama, berita dengan judul “Pembangunan Tetap Dilanjutkan Tidak Ada Penolakan, Harus Didukung untuk Kemajuan Sangatta Selatan” memiliki sedikit paragraf yaitu 1-10 paragraf. Dalam berita tersebut isi dari berita ini singkat padat dan jelas. Tak hanya itu, isi dari berita ini mengandung sisi positif dan juga sisi negatif yang membuat berita ini sangat netral dan transparan.

Kedua, berita dengan judul “Ibu Kota Bikin Proyek Bergairah Merangsang Investor Sambung Tol Balsam Sampai Bontang” memiliki banyak paragraf yaitu 11-20 paragraf. Isi dari berita tersebut menurut peneliti sangat bertele-tele dan tidak langsung ke topik permasalahan. Dalam berita tersebut juga hanya mengatakan sisi-sisi baik dari proyek pembangunan yang akan dilakukan tersebut dan tidak menunjukkan apa-apa saja kekurangan dan kendala yang dihadapi.

Ketiga, berita dengan judul “Kaltim Berharap Banyak Proyek Strategis Pemindahan IKN, Pansus Khawatir Pertanian Beralih Fungsi” memiliki jumlah halaman yang banyak yaitu 21-30 halaman. Tak jauh beda dari contoh kedua, isi berita ini juga tidak membahas langsung ke topik permasalahan. Berita ini juga membahas hanya kebaikan-kebaikannya saja dan tidak menunjukkan kekurangan yang dihadapi kedepannya.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa berita yang memiliki paragraf yang banyak tidak semuanya memiliki isi yang menarik dan memiliki urgensi. Justru sebaliknya berita yang memiliki paragraf yang panjang kebanyakan memiliki pembahasan yang tidak langsung kepada inti dari berita itu sendiri. Berita yang disampaikan menggunakan bahasa serta kalimat yang kurang efektif. Tidak sedikit berita yang pembahasannya meluas sehingga membingungkan pembaca karena tidak jelas arah berita tersebut akan kemana. Isi beritanya seolah-olah menjadi kabur. Bahkan membuat pembaca kebingungan dengan inti berita tersebut.

Berbeda dengan isi berita yang memiliki paragraf sedikit. Berita pembangunan daerah dengan paragraf yang sedikit memiliki isi berita yang singkat, padat, dan jelas sehingga pembaca langsung tau apa tujuan berita itu dibuat. Kebanyakan berita yang memiliki paragraf yang tergolong sedikit justru memiliki urgensi dan menarik untuk diketahui masyarakat.

6. Tema berita isu pembangunan daerah

Tema merupakan unsur yang terkandung dalam berita, dan tema juga menjadi dasar jurnalis untuk mengembangkan berita tersebut. Penelitian ini mengenai berita isu pembangunan daerah. Untuk memudahkan proses analisis, peneliti membagi tema berita menjadi tiga bagian, yaitu pembangunan infrastruktur, kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, dan yang terakhir adalah pembangunan untuk menyambut ibukota baru. Jumlah dan presentase dapat dilihat pada tabel berikut:

Tema Berita	Jumlah	Presentase
Pembangunan Infrakstruktur	13	54.2%

Kinerja Pemerintah Daerah	3	12.5%
Menyambut Ibu Kota	8	33.3%
Total	24	100.0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa berita isu pembangunan daerah dengan tema pembangunan infrastruktur memiliki presentase paling besar yaitu 54.2% dengan jumlah 13 berita, berita isu pembangunan daerah dengan tema kinerja pemerintah daerah memiliki jumlah 3 berita dengan presentase 12.5%, dan yang terakhir adalah berita isu pembangunan daerah dengan tema menyambut ibu kota yang berjumlah 8 berita dengan presentase 33.3%.

Banyaknya berita pembangunan daerah dengan tema pembangunan infrakstruktur sejalan dengan pemerintah Kalimantan Timur yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan dan perbaikan infrakstruktur guna mempersiapkan ibu kota baru beserta kota-kota penyangganya. Meskipun berita pembangunan daerah dengan tema pembanguana infrakstuktur tidak menyatakan secara terang-terangan untuk membangun kota-kota penyangga ibu kota baru, akan tetapi penulis menemukan hasil bahwa pembangunan infrakstruktur banyak mengangkat masalah banjir dan pembangunan sarana umum. Hal ini secara tidak langsung tentu saja sejalan dengan rencana pembangunan ibu kota.

Peneliti mengambil tiga contoh pada masing-masing tema berita pembangunan daerah yang dimuat kaltim post. Pertama, dengan judul “Menunggu IMB Terbit Pembangunan Pabrik CPO Bisa Dilanjutkan” yang tema beritanya adalah pembangunan iinfrastruktur. Berita ini membahas tentang pabrik CPO yang sudah bisa dilanjutkan yang sebelumnya bermasalah dengan izin. Isi dari berita ini mengenai izin yang tertunda-tunda dengan berbagai alasan yang menyebabkan tidak bisa dilakukannya pembangunan pabrik tersebut. Tetapi mulai tanggal 20 Oktober 2019 sudah bisa dilakukan pembangunan dikarenakan semua izin yang sudah rampung. Pabrik ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat, apalagi dengan adanya rencana ibu kota yang

akan pindah ke Kalimantan Timur. Sudah pasti akan banyak masyarakat dari luar daerah yang akan mencari pekerjaan di sekitar atau di ibu kota itu sendiri.

Kedua, dengan judul “Perjuangkan IKN Komisi VII Masih Gemuk” yang tema beritanya adalah kinerja pemerintah daerah. Berita ini juga punya logo yang bertuliskan “Menyambut Ibu Kota” Isi dari berita ini adalah pembagian komisi-komisi untuk mengurus ibu kota baru kelak. Tidak semenarik apa yang telah dituliskan didalam judul yaitu bertuliskan “gemuk” yang menurut peneliti terlalu ambigu hingga menimbulkan banyak perspektif dari masyarakat.

Ketiga, dengan judul “Majukan Kampus Lokal Sebelum UI Buka Cabang” yang tema beritanya menyambut ibu kota. Berita ini membahas tentang kampus-kampus yang ada di Kalimantan yang diharapkan bisa bersaing dengan kampus-kampus yang ada di ibu kota yang lama yaitu Jakarta. Isi berita ini mengatakan kemungkinan besar pemerintah pusat merealisasikan wacana membuka cabang kampus ternama dipulau Jawa ke Benua Etam ini. Mendengar hal itu, Kampus ITK Balikpapan langsung melakukan perombakan besar-besaran untuk bisa bersaing dengan kampus-kampus yang ada diluar Kalimantan terutama kampus-kampus yang berada di Jawa. Bahkan rektor universitas mulawarman atau yang biasa disebut Unmul ini mengatakan bahwa Unmul sangat siap untuk menjadi UI baru di Kaltim. Mereka mengatakan lebih baik memaksimalkan Universitas-Universitas yang sudah ada, ketimbang membuka cabang Universitas ternama di Jawa.

Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa, mayoritas pembangunan daerah yang dimuat dimedia Kaltim Post tak semata-mata hanya melakukan pembangunan biasa melainkan untuk mempersiapkan kota-kota penyangga ibu kota baru kelak. Dan juga menunjukkan perubahan pembangunan daerah secara fisik untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

7. Sumber berita isu pembangunan daerah

Sumber berita adalah asal dari sebuah berita. Sumber berita ini dapat bersumber dari manusia atau lingkungan sekitar. Peneliti membagi sumber berita isu pembangunan daerah menjadi liputan langsung, press release, kantor berita, media lain dan gabungan dari beberapa sumber. Kemudian peneliti mendapatkan hasil bahwa sumber berita isu pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian,

yaitu liputan langsung dan gabungan. Pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sumber Berita	Jumlah	Presentase
Liputan Langsung	23	95.8%
Press Release	0	0%
Kantor Berita	0	0%
Media Lain	0	0%
Gabungan	1	4.2%
Total	24	100.0%

Tabel diatas menyatakan bahwa 23 berita isu pembangunan daerah atau setara dengan 95.8 menggunakan liputan langsung sebagai sumber berita, sedangkan sisanya yang berjumlah 1 berita isu pembangunan daerah setara dengan presentase 4.2% mendapatkan informasi berita melalui gabungan dari berbagai sumber.

Berita dengan sumber liputan langsung merupakan berita yang informasinya diperoleh secara langsung oleh jurnalis. Jurnalis memiliki kendali penuh terhadap proses pencarian informasi dan penyusunan berita. Termasuk memilih pihak-pihak yang dijadikan narasumber. Jurnalis dapat menentukan arah isi berita melalui narasumber, hal ini dikarenakan narasumber menjadi pusat informasi yang berkaitan dengan isi berita.

Peneliti mengambil beberapa contoh berita pembangunan daerah yang dimuat oleh Kaltim Post untuk melihat perbedaan berita dari sisi sumber berita. Pertama,

berita dengan judul “Progres 85 Persen, Dibuka Awal Tahun Depan” dengan sumber berita melalui liputan langsung. Berita tersebut membahas tentang jalan alternatif kilometer tujuh yang ada di Balikpapan. Isi dari berita ini mengatakan bahwa jalan ini sudah hampir siap digunakan. Jalan ini juga akan mengurangi macet yang ada di jalan kilometer lima yang hampir setiap hari mengalami macet. Jalan ini juga melewati perumahan Grand City. Dalam berita tersebut hanya menjelaskan mengenai dampak positif jika jalan ini sudah bisa digunakan. Tetapi tidak menjelaskan kekurangan atau sisi negatif dari pembangunan jalan ini sendiri. Tidak ada pendapat masyarakat dan warga-warga yang tinggal di perumahan Grand City yang terdampak oleh pembangunan jalan tersebut.

Kedua, dengan judul “Ibu Kota Bikin Proyek Tol Bergairah” dengan sumber berita melalui gabung yaitu liputan langsung dan mengambil dari informasi yang sudah pernah diberitakan. Dalam berita tersebut mengatakan bahwa pembangunan tol ini dipersiapkan untuk ibu kota baru agar masyarakat lebih mudah berpergian dan menghemat waktu. Akan tetapi proyek tol ini masih mengalami kemunduran dari jadwal lantaran dihadap sejumlah persoalan terutama penyediaan lahan. Tetapi persoalan itu sudah diselesaikan oleh pemerintah. Berita ini juga hanya memasukkan nilai-nilai positif saja dan tidak memberikan nilai-nilai negatif agar berita ini lebih transparan. Walaupun menggunakan sumber gabungan yaitu dari media lain, jurnalis tetap saja hanya memunculkan nilai positif saja.

Melalui hasil tersebut dapat ditarik garis besar bahwa jurnalis sebenarnya memiliki wewenang penuh terhadap penyusunan sebuah berita. Jurnalis mempunyai kebebasan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Akan tetapi sekarang ini jurnalis seperti berada dibawah kendali yang membatasi ruang gerak jurnalis untuk mendapatkan informasi dan fakta. Tekanan ekonomi politik media membuat jurnalis cenderung mencari sumber informasi dari pihak-pihak yang berpengaruh dan berkaitan dengan isi berita, agar jurnalis tersebut “aman” dari tuntutan pihak tertentu. Akibatnya jurnalis tidak dapat terbuka dalam menyampaikan suatu berita meskipun sebenarnya sudah memiliki kebebasan dalam mengumpulkan informasi. Meskipun jurnalis juga memiliki etika-etika yang harus dipenuhi disaat membuat berita.

8. Subjek berita isu pembangunan daerah

Dari segi subjek berita isu pembangunan daerah, peneliti membagi subjek menjadi tiga kategori. Yakni, masyarakat, pemerintah, dan pemilik modal. Dalam penelitian ini jumlah dan presentase berita dapat dilihat pada tabel berikut:

Subjek Berita	Jumlah	Presentase
Masyarakat	6	25.0%
Pemerintah	16	66.7%
Pemilik Modal	2	8.3%
Total	24	100.0%

Menurut hasil diatas pada berita isu pembangunan daerah banyak bersubjek kepada pemerintah, yang jumlah beritanya mencapai 16 berita dengan presentase 66.7%, bersubjek pada masyarakat memiliki jumlah 6 berita dengan presentase 25%, dan yang terakhir adalah bersubjek kepada pemilik modal dengan jumlah 2 berita dengan presentase 8.3%.

Dalam berita isu pembangunan daerah mayoritas bersubjek ke pemerintah. Dikarenakan pemerintah memiliki wewenang penuh atas pembangunan daerah mulai dari perencanaan hingga pembangunan itu sendiri. Peneliti mengambil tiga contoh berita pembangunan daerah yang dimuat Kaltim Post untuk membandingkan isi berita pembangunan daerah berdasarkan subjek berita tersebut.

Pertama, dengan judul “Pembangunan Tetap Dilanjutkan” yang bersubjek kepada masyarakat. Dalam berita ini membahas bahwa pembangunan ini sudah dinanti-nanti oleh banyak warga Sangatta. Sebagian besar warga Sangatta mendukung adanya pembangunan jembatan ini agar mempermudah warga untuk menyebrang. Karena beberapa narasumber mengatakan membayar ongkos penyebrangan ponton (kapal penyebrangan) lama kelamaan terasa berat. Tidak hanya itu, jembatan ini juga akan membatu masyarakat dikala hujan turun dan

banjir melanda. Tetapi sebagian pekerja ponton protes dengan adanya jembatan ini. Mereka menganggap bahwa jembatan ini akan memangkas usaha mereka.

Kedua, dengan judul “Majulah Kampus Lokal Sebelum UI Buka Cabang” yang bersubjek kepada pemerintah. Berita ini membahas tentang kampus-kampus yang ada di Kalimantan yang diharapkan bisa bersaing dengan kampus-kampus yang ada di ibu kota yang lama yaitu Jakarta. Isi berita ini mengatakan kemungkinan besar pemerintah pusat merealisasikan wacana membuka cabang kampus ternama dipulau Jawa ke Benua Etam ini. Mendengar hal itu, Kampus ITK Balikpapan langsung melakukan perombakan besar-besaran untuk bisa bersaing dengan kampus-kampus yang ada diluar Kalimantan terutama kampus-kampus yang berada di Jawa. Bahkan rektor universitas mulawarman atau yang biasa disebut Unmul ini mengatakan bahwa Unmul sangat siap untuk menjadi UI baru di kaltim. Mereka mengatakan lebih baik memaksimalkan Universitas-Universitas yang sudah ada, ketimbang membuka cabang Universitas ternama di Jawa.

Ketiga, dengan judul “Menunggu IMB Terbit Pembangunan Pabrik CPO Dilanjutkan” yang bersumber kepada pemilik modal. Berita ini membahas tentang pabrik CPO yang sudah bisa dilanjutkan yang sebelumnya bermasalah dengan izin. Isi dari berita ini mengenai izin yang tertunda-tunda dengan berbagai alasan yang menyebabkan tidak bisa dilakukannya pembangunan pabrik tersebut. Tetapi mulai tanggal 20 Oktober 2019 sudah bisa dilakukan pembangunan dikarenakan semua izin yang sudah rampung. Pabrik ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat, apalagi dengan adanya rencana ibu kota yang akan pindah ke Kalimantan Timur. Sudah pasti akan banyak masyarakat dari luar daerah yang akan mencari pekerjaan di sekitar atau di ibu kota itu sendiri.

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam ekonomi politik media, pemilik modal mampu menentukan arah dan isi berita yang akan dimuat. Sehingga tidak jarang ditemui berita yang dimuat pada media, yang subjeknya mendominasi koran atau tidak netral. Mayoritas berita yang bersubjek pemerintah selalu menggambarkan hanya sisi baiknya saja dan beritanya tidak transparan. Berbeda dengan berita yang bersubjek kepada masyarakat. Terlihat lebih transparan, jujur dan menyampaikan kelebihan serta kekurangannya.

9. Keberpihakan isi berita isu pembangunan daerah

Sebuah isi berita mungkin saja tidak bersifat netral. Terdapat keberpihakan pada sebuah institusi, organisasi atau persona. Dalam penelitian ini keberpihakan isi berita, peneliti membagi menjadi tiga kategori. Yaitu masyarakat, pemerintah, dan yang terakhir adalah netral. Jumlah dan presentase berita dapat dilihat pada tabel berikut:

Keberpihakan	Jumlah	Presentase
Masyarakat	3	12.5%
Netral	3	12.5%
Pemerintah	18	75.0%
Total	24	100.0%

Hasil dari tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa keberpihakan isi berita pembangunan daerah didominasi oleh keberpihakan kepada pemerintah dengan jumlah 18 berita yakni setara dengan 75%, sedangkan jumlah keberpihakan kepada masyarakat sama dengan netral yakni masing-masing 3 berita yang setara dengan 12.5%.

Dalam berita pembangunan daerah yang dimuat oleh Kaltim Post mayoritas berpihak kepada pemerintah. Yang berarti isi dari berita tersebut tidak bersifat netral dan transparan. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan berita jurnalis mendapatkan tekanan dari pemilik media. Sehingga jurnalis tidak dapat bekerja secara profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik yang mengatakan bahwa jurnalis harus bersifat akurat, jujur dan independen. Jurnalis juga diharuskan bersikap adil dan tidak memihak.

Peneliti mengambil beberapa contoh sebagai pembandingan bagaimana isi berita berdasarkan keberpihakannya. Pertama, dengan judul “Kebut Tiga Gorong-Gorong Ditarget Rampung Selambatnya Akhir Tahun” yang berpihak kepada masyarakat. Berita ini berisi tentang gorong-gorong untuk menanggulangi banjir.

Didalam berita tersebut memiliki kesulitan dikarenakan harus menutup jalan pengguna jalan. Tetapi diberi solusi dengan cara membuat alternatif jalan lain agar pengguna jalan tidak kesusahan. Tak hanya itu, Dinas PU juga membuat sosialisasi agar masyarakat tidak kaget dan bingung dengan adanya proyek gorong-gorong tersebut.

Kedua, dengan judul “Lima Titik Parit Telah Diperbaiki” yang keberpihakannya netral. Berita ini berisi tentang perbaikan parit yang ada di Bontang. Isi berita ini menunjukkan warga yang antusias untuk menggunakan program 200 juta untuk memperbaiki parit-parit yang ada di sekitar Kelurahan Berebas. Dikatakan bahwa parit disekitar sudah banyak yang rusak sehingga jika hujan bisa menyebabkan banjir. Oleh karena itu warga ingin parit-parit disana diperbaiki.

Ketiga, dengan judul “Bangun Ibu Kota yang Ramah Lingkungan” yang berpihak kepada pemerintah. Berita ini membahas tentang pemindahan ibu kota yang akan diikuti dengan pembangunan yang masif dan memperhatikan aspek lingkungan. Isi dari berita ini menjelaskan dukungan-dukungan pemerintah yang ingin ibu kota baru menjadi ibu kota yang ramah lingkungan dan menjadi lebih baik dari ibu kota sebelumnya yaitu Jakarta. Tidak dijelaskan apa-apa saja yang menjadi halangan untuk menjalankan proyek-proyek tersebut. Tak hanya itu, masyarakat juga tidak ditanyakan apakah proyek-proyek ini akan menguntungkan masyarakat atau malah sebaliknya menjadi kerugian masyarakat karena adanya proyek-proyek tersebut.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa mayoritas berita pembangunan daerah yang dimuat oleh Kaltim Post ini dipegang penuh oleh pemerintah. Karena itu pemerintah mampu menentukan kemana arah isi berita tersebut. Sehingga membuat jurnalis-jurnalis tertekan dan hanya mampu memuat apa saja yang dikehendaki pemerintah. Tidak seperti yang dijelaskan sebelumnya, etika jurnalis seharusnya bersifat akurat, jujur, dan independen.

10. Isi berita isu pembangunan daerah

Isi berita adalah mengenai suatu informasi yang sedang terjadi. Peneliti membagi isi berita isu pembangunan daerah menjadi tiga bagian, yakni bersifat positif, negatif, dan netral. Jumlah dan presentase berita dapat dilihat pada tabel berikut:

Isi Berita	Jumlah	Presentase
Positif	19	79.2%
Negatif	1	4.2%
Netral	4	16.7%
Total	24	100.0%

Dalam tabel dan diagram diatas dapat kita lihat banyak berita isu pembangunan daerah yang bersifat positif yang mencapai 19 berita setara dengan 79.2%, kemudian berita isu pembangunan daerah yang bersifat netral memiliki 4 berita yang setara dengan 16.7%, dan yang terakhir adalah berita isu pembangunan daerah yang bersifat negatif yang memiliki 1 berita setara dengan 4.2%.

Dalam isi berita pembangunan daerah yang dimuat Kaltim Post ini mayoritas memiliki isi yang positif. Hasil ini sejalan dengan keberpihakan isi berita bahwa berita-berita yang positif berpihak kepada pemerintah. Berdasarkan teori ekonomi politik media, pemilik modal mampu menentukan kemana arah isi berita itu akan dibawakan. Disini dapat diartikan bahwa pemilik modal adalah pemerintah yang bisa menentukan apakah berita tersebut akan bersifat positif, negatif bahkan netral.

Peneliti mengambil beberapa contoh guna membuktikan adanya hubungan antara sifat berita dengan keberpihakan isi berita. Pertama, dengan judul “Tanpa Tambang di Sekitar Ibu Kota Negara” yang memiliki isi berita positif. Dalam berita ini membahas tentang ibu kota baru yang menginginkan tanpa tambang disekitarnya. Isi dari berita ini mengatakan bahwa mayoritas narasumber tidak masalah jika adanya pertambangan disekitar ibu kota. Padahal alangkah baiknya jika pertambangan-pertambangan bisa jauh dari ibu kota agar tidak terkena dampak dari pertambangan. Berita ini positif karena didukung penuh oleh pemerintah yang memberikan komentar-komentar seakan-akan menolak

pertambangan. Akan tetapi tidak mampu merevisi lokasi tambang yang sudah berdiri sebelumnya.

Kedua, dengan judul “Masih Butuh 30 Miliar” dengan isi berita yang negatif. Berita ini membahas tentang pembangunan poliklinik yang masih butuh 30 miliar. Isi dari berita tersebut menjelaskan fakta-fakta mengenai kekurangan dan pengeluaran dana serta progres pembangunan RSUD. Berita ini cenderung transparan dan jujur karena menampilkan fakta tanpa menutupi kekurangan pembangunan tersebut. Dikatakan negatif karena berita ini mengandung sisi negatif dari pembangunan poliklinik tersebut.

Ketiga, dengan judul “Anggaran Lampu Runway Tertahan di Pusat” dengan isi berita yang netral. Berita ini membahas tentang anggaran lampu runway bandara yang belum terpasang. Dalam isi berita ini mengatakan bahwa tertahannya uang lampu runway bandara di pusat yang membuat bandara tidak maksimal dalam melakukan kegiatannya. Contohnya bandara hanya bisa buka hingga sore hari dan tidak beroperasi pada malam hari. Ini dikarenakan pilot-pilot yang tidak bisa melihat jalanan untuk mendarat dikarenakan bandara tidak memiliki lampu runway. Berita ini netral karena memiliki perspektif dari berbagai narasumber. Ada yang berkomentar positif dan ada juga yang berkomentar negatif.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara sifat isi berita dengan keberpihakan isi berita. Berita dengan sifat positif berpihak kepada pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya berita tersebut bertujuan untuk menjaga citra pemerintah di mata masyarakat. Sedangkan berita yang berisi negatif dan netral justru lebih terlihat jujur dan lebih dipercaya masyarakat yang membaca.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Sasmito dan Dyanasari (2018:23) menjelaskan bahwa ekonomi politik merupakan sebuah studi produksi dan perdagangan yang memiliki hubungan dengan adat, pemerintah, dan yang terakhir hukum. Ilmu ekonomi politik ini menggunakan teori dan metode ekonomi yang mempengaruhi sistem sosial serta

ekonomi. Ekonomi politik merupakan sebuah istilah teori atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara proses ekonomi dan keadaan politik tertentu.

Schubert & Klein dalam Hardy (2014) mengatakan bahwa ekonomi politik memiliki keterkaitan antara proses ekonomi dan keadaan politik tertentu. Ekonomi politik kerap dikaitkan dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Bidang kaji ini juga menelaah tentang proses, bagaimana kebijakan publik dibuat dan kemudian diterapkan. Pada dasarnya, tiap individu dan kelompok mempunyai kepentingannya sendiri dan tentu berbeda di suatu negara atau ekonomi yang berkembang. Oleh karena itu, ekonomi politik ini dijadikan sebagai disiplin ilmu yang cukup kompleks, dimana mencakup berbagai macam dan jenis kepentingan yang berpotensi terjadinyapersaingan.

Menurut Eatwell, Milgate and Newman, 1987:907 dalam Mosco (22:1996) mengatakan bahwa :

From conceptual point of view, "political economy is the science of wealth and deals with efforts made by man to supply wants and satisfy desires." Before political economy became a science, it served as the intellectual description for a system of production, distribution, and exchange.

Kutipan diatas menjelaskan bahwa ekonomi politik sebenarnya adalah merupakan sebuah ilmu tentang kekayaan yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan manusia untuk terus memenuhi keinginannya. Mosco juga menekankan bahwa sebelum ekonomi politik menjadi sebuah ilmu, ekonomi politik ini berhubungan dengan system produksi, distribusi dan pertukaran. Oleh karenanya Mosco (1996) kemudian mendefinisikan ekonomi politik sebagai sebuah ilmu yang berkaitan dengan hubungan sosial, khususnya kekuasaan yang saling membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi politik kemudian mudah berkembang dengan disiplin ilmu yang lain. Ekonomi politik kemudian turut berkontribusi dalam perkembangan dalam beberapa sektor, seperti sektor media. Perusahaan media menjadi tempat yang sangat berpotensi akan praktik ekonomi politik. Hal ini dikarenakan perusahaan media memiliki kedudukan yang paling kuat dalam menentukan pandangan publik. Informasi yang disebarkan melalui media dapat mengubah atau menggiring pemikiran penerima pesan.

Media massa memiliki kekuatan yang sebagaimana dijelaskan oleh McQuail (dalam Dwita, 2016:254)

“kekuatan media massa yang sebenarnya adalah menarik dan mengarahkan perhatian publik, mengubah opini dan kepercayaan publik, mempengaruhi sikap, membentuk realitas, memberikan status dan legitimasi, serta menyebarkan informasi secara cepat luas dan bersamaan”

Teori ekonomi politik media menitikberatkan pada media massa dan budaya massa yang keduanya terkait dengan sejumlah isu sosial yang terjadi di masyarakat. Teori tersebut berfokus pada pembatasan atau hambatan yang diberlakukan oleh praktisi media yang mengurangi produksi konten pekerja media. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk melakukan perubahan sosial yang konstruktif ditunda. (Suchaya, 2013: 17)

Ekonomi politik media sangat erat kaitannya dengan isu permodalan atau permodalan investor yang bergerak di industri media. Para pemilik modal memanfaatkan media sebagai upaya memperoleh keuntungan, dimana keuntungan tersebut dikembalikan kepada perkembangan media tersebut. Akumulasi keuntungan ini menyebabkan kepemilikan media melonjak. (Suchaya, 2013: 16)

Melalui model kepemilikan dan produk yang ditampilkan, media menjadi alat ideologis yang memungkinkan kelas kapital untuk mempertahankan posisi dominan atas masyarakat yang dianggap hanya sebagai konsumen dan yang berhak menumpas regulasi yang pro pasar. Media juga merupakan media periklanan utama, dan jelas dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dengan memainkan hubungan antara dunia produksi dan konsumsi. Di sisi lain, media massa juga telah memimpin atau memperkuat struktur ekonomi dan politik tertentu. (Habsari, 2012)

Menurut Sudiby dalam Nasharudin (2017:26) mengatakan fenomena media bukan hanya membutuhkan pengamatan yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan ekonomi, melainkan juga pendekatan politik. Ekonomi politik dalam media berfokus pada kepemilikan media yang mempengaruhi proses organisasi produksi media, tenaga kerja, strategi dan operasi lembaga media masa tersebut. Para pemilik modal mampu mengontrol output dari sebuah media. Hubungan antara pemilik media dengan pihak pemilik modal merupakan faktor utama dalam penyusunan konten, produksi, hingga pengoperasian media.

Pernyataan tersebut juga didukung dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik oleh Sudiby (2000:120) yang menyatakan bahwa kekuatan ekonomi dan politik diluar media mampu menentukan isi media. Faktor pemilik media, iklan, pemilik modal serta regulasi pemerintah dapat menentukan bagaimana isi media. Penentuan isi media lebih kepada kearah mana isi berita tersebut akan diarahkan serta peristiwa apa saja yang dapat ditampilkan dalam pemberitaan tersebut. Dalam praktik ekonomi politik media terdapat campur tangan ekonomi dalam struktur produksi berita pada sebuah perusahaan bisnis media. Secara garis besar jenis dan isi pemberitaan ditentukan oleh kekuatan ekonomi yang dominan dalam perusahaan media.

Hal tersebut berpengaruh kepada kredibilitas media. Sumber media yang independen semakin berkurang, media tidak lagi berkonsentrasi pada khalayak luas, dan media akan cenderung mengabaikan khalayak minoritas. Perusahaan media memiliki ketergantungan terhadap konsumen sebagai pembeli produk dan produsen sebagai pemasang iklan, karena perusahaan media mendapatkan pendapatan melalui pasar konsumen dan pasar iklan. Praktik ekonomi politik media menyebabkan semakin tingginya ketergantungan perusahaan media terhadap iklan sebagai sumber pendapatan. Maka, akan semakin rendah juga independensi media dalam membuat konten berita. (Suchaya, 2013:19)

Sebagai salah satu contoh nyata adalah kasus demo dan mogok kerja yang dilakukan oleh buruh pabrik rokok Gudang Garam. Aksi demo dan mogok kerja besar-besaran yang dilakukan oleh buruh pabrik Gudang Garam ini tidak diberitakan dengan gencar. Bahkan beberapa media memilih untuk tidak memberitakannya sama sekali. Hal ini dikarenakan perusahaan rokok Gudang Garam merupakan penyumbang iklan terbesar bagi bisnis media. Perusahaan media lebih memilih untuk tidak memberitakan kasus tersebut daripada mendapat akibat pada putusnya hubungan pengiklan Gudang Garam. Dalam kata lain terdapat ketergantungan antara perusahaan media dengan pemilik modal. Media lebih memilih terlihat tidak tahu atas kasus tersebut daripada kehilangan sumber pendapatan perusahaan media. Secara garis besar pertimbangan ekonomi mampu menentukan apakah media akan memberikan informasi kepada khalayak atau tidak. Faktor ekonomi politik mampu menentukan arah dan perilaku media yang pengaruhnya bersifat langsung dan searah. (Sudiby, 2000:125)

Praktik ekonomi politik pada perusahaan media tidak hanya terpatuk pada media elektronik saja, media cetakpun tidak luput dari praktik ekonomi politik media. Meskipun sumber informasi telah bermigrasi menuju era digital, namun media cetak seperti koran tetap diminati oleh masyarakat. Kelebihan media cetak yakni berada pada agenda dan penyeleksian berita yang dilakukan secara bertahap hingga dapat memproduksi format berita yang terbaik. Penelitian ini membahas mengenai praktik ekonomi politik di media masa koran. Faktor pemilik media, iklan, pemilik modal serta regulasi pemerintah dapat menentukan bagaimana isi media. Penentuan isi media lebih kepada kearah mana isi berita tersebut akan diarahkan serta peristiwa apa saja yang dapat ditampilkan dalam pemberitaan tersebut. Dalam praktiknya, ekonomi cenderung terlibat dalam pelaksanaan ekonomi politik media. Keterlibatan tersebut tampak pada struktur produksi berita di sebuah perusahaan bisnis media, dimana jenis dan isi berita ditentukan oleh kekuatan ekonomi yang dominan

Hal tersebut berpengaruh kepada kredibilitas media. Sumber media yang independen semakin berkurang, media tidak lagi berkonsentrasi pada khalayak luas, dan media akan cenderung mengabaikan khalayak minoritas. Perusahaan media memiliki ketergantungan terhadap konsumen sebagai pembeli produk dan produsen sebagai pemasang iklan, karena perusahaan media mendapatkan pendapatan melalui pasar konsumen dan pasar iklan. Praktik ekonomi politik media menyebabkan semakin tingginya ketergantungan perusahaan media terhadap iklan sebagai sumber pendapatan. Maka, akan semakin rendah juga independensi media dalam membuat konten berita. (Suahya, 2013:19)

Pemilihan media Kaltim Post dilatar belakangi oleh pertama, adanya rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah Kabupaten Penajam Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Rencana pemindahan ibu kota tersebut secara otomatis akan berpengaruh kepada sektor pembangunan daerah Kalimantan Timur. Kedua, adanya hasil penelitian dilakukan oleh Nielsen tentang belanja iklan pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa tren belanja iklan di media cetak khususnya koran didominasi dari iklan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut membuktikan dari produk yang beriklan paling banyak dikoran sepanjang 2015, pemerintah daerah Kalimantan Timur menduduki urutan kedua yang mencapai Rp534,8 miliar.

Penelitian ini melihat praktik ekonomi politik di media Kaltim Post dilihat dari berita yang berkaitan dengan pembangunan daerah Kalimantan Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur kini tengah gencar dalam melakukan pembangunan diberbagai sektor guna mempersiapkan berpindahnya Ibu Kota Indonesia. Pembangunan yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur tidak dapat lepas dari pemberitaan di media baik media lokal maupun nasional. Peneliti ingin melihat lebih jauh pada media cetak lokal Kaltim Post. Fokusnya lebih kepada apakah pada berita pembangunan daerah di Kaltim Post terdapat praktik ekonomi politik atau tidak.

Jika dalam pemberitaan tersebut terdapat praktik ekonomi politik, tentu terdapat hubungan antara berita yang disampaikan dengan komponen penting dalam sebuah berita. Menurut Crotau dan Hoynest dalam Sucahya (2013:19-20) terdapat empat indikator untuk menandai jika sebuah media lebih mementingkan ekonomi daripada mementingkan ruang publik dalam menyebarkan berita. Empat indikator tersebut adalah :

1. Program berita homogen dan imitasi

Homogen dan imitasi memiliki makna bahwa produk berita yang disampaikan sama, seragam atau duplikasi dari produk yang sudah ada. Homogen juga dapat berarti bahwa berita yang disampaikan meniru berita yang sedang *trend* dan sukses guna meminimalisir kerugian dan meraih untung dengan cepat.

2. Menyiarkan informasi sensasional

Membuat program berita yang sensasional dan gosip termasuk dalam salahsatu indikator bahwa media lebih mementingkan sektor ekonomi daripada kepentingan ruang public. Tujuan memproduksi berita sensasional dan gosip adalah untuk mendapatkan perhatian audience yang banyak dengan biaya produksi berita yang murah.

3. Hilangnya batasan antara jurnalistik dan bisnis

Perubahan struktur pada perusahaan media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap isi berita yang dihasilkan media. Demi keuntungan secara ekonomi perusahaan media melompati batasan antara berita dan bisnis. Perusahaan media sering kali tidak mengindahkan batasan jurnalistik dan bisnis. Mudahnya faktor ekonomi mempengaruhi profesionalitas jurnalis dan isi berita.

4. Menyensor diri sendiri

Self-Censorsip adalah norma-norma organisasi dalam perusahaan media dan kepentingan pemilik modal yang kuat menyebabkan perubahan isi berita.

Berdasarkan empat indikator diatas, dapat dikatakan bahwa narasumber memiliki peran dalam komponen penting sebuah berita. Narasumber menjadi pusat informasi yang berkaitan dengan isi berita. Keterangan dari narasumberlah yang kemudian dijadikan isi berita. Ketika sebuah media menampilkan berita yang homogen tentu berkaitan juga dengan narasumber yang didapatkan. Pihak pemilik modal menekan jurnalis untuk mengumpulkan informasi dengan narasumber yang terbatas. Sehingga, narasumber terkesan memberikan informasi yang monoton.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan hasil bahwa sebanyak 14 berita memiliki narasumber berjumlah 1-2 orang. Hampir keseluruhan narasumber dalam berita adalah pejabat atau orang yang memiliki pengaruh besar dalam proses pemberitaan tersebut. Artinya lebih dari setengah berita pembangunan daerah yang ditampilkan di Kaltim Post informasinya didapatkan melalui narasumber yang terbatas dan orang-orang yang berpengaruh. Hasil penelitian ini sesuai dengan indikator media mementingkan factor ekonomi politik daripada kepentingan ruang public. Yakni, pada point berita yang disampaikan homogen dan imitasi.

Pada saat narasumber memberikan informasi, narasumber terkadang tidak bersifat netral. Penuturan narasumber dapat mempengaruhi sudut pandang pembaca dalam melihat sebuah berita. Jika dikaji secara konseptual, media tidak dapat terpisah atau dipisahkan dengan 'apa' yang diperoleh dan dilaporkan. Apa tersebut merujuk pada dengan bagaimana hal tersebut dilaporkan dan dibingkai. Sebuah media mampu mengkonstruksi sebuah informasi menjadi sebuah wacana yang memiliki makna. Media mampu mengubah cara berfikir dan cara pandang audiens.

Hasil yang didapatkan oleh peneliti dalam menganalisis narasumber berita tersebut tidak sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Nashrudin yang berjudul *Ekonomi Politik Media: Pada Pemberitaan Menjelang Pemilihan Gubernur Banten 2017* oleh Radar Banten dan Baraya TV, bahwa seorang jurnalis lebih baik tidak memiliki kedekatan dengan tokoh politik atau pejabat tertentu. Karena

dikhawatirkan akan berpengaruh kepada pemberitaan, dan jangan sampai jurnalis melakukan “framing” tertentu terhadap tokoh politik atau pejabat tertentu. Pada praktik ekonomi politik, antara jurnalis dan narasumber saling terhubung, atau dikatakan dengan berelasi. Hal itu dijelaskan dengan bagaimana keduanya saling mendapatkan keuntungan. Sang jurnalis akan memperoleh data dan bahan untuk penulisan berita dan narasumber juga mendapatkan panggung untuk opini yang ingin diperhatikan oleh publik.

Pada kenyataannya sebuah berita akan lebih baik jika menampilkan narasumber dari pihak yang netral juga. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Nashrudin dalam penelitiannya yang berjudul *Ekonomi Politik Media: Pada Pemberitaan Menjelang Pemilihan Gubernur Banten 2017 Oleh Radar Banten dan Baraya TV*, penelitian tersebut mengatakan bahwa masyarakat sebagai pihak yang dominan justru bersifat pasif. Sedangkan pihak-pihak yang tidak dominan justru memiliki peran yang aktif dalam memstimulasi sebuah isi berita. Dengan adanya narasumber yang memiliki pengaruh besar, sebuah berita akan dengan mudah untuk digiring sesuai dengan keinginan narasumber guna menjaga citra sebuah institusi atau individu.

Selain narasumber yang mempengaruhi sudut pandang, letak halaman juga mempunyai pengaruh. Ketika sebuah berita diletakan pada halaman awal sebuah berita, tentu saja akan menarik minat pembaca. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa sebanyak 17 berita pembangunan daerah ditempatkan pada halaman awal koran Kaltim Post. Yakni antara halaman 1-10. Berita atau peristiwa akan dijadikan headline, yang juga memuat standar; eksklusivitas, informasi yang banyak, keintiman emosional, unsur individu, atraktif, berita tidak sensasional, tetapi dramatis. Oleh karena itu, apabila suatu berita atau event memuat kondisi di atas, maka sangat layak untuk dijadikan headline news. Wandik,dkk (2017)

Kutipan dan hasil pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah berita yang dijadikan headline dapat menarik minat serta menggiring perspektif pembaca. Media mampu membuat sebuah isu menjadi lebih penting agar dapat mempengaruhi pembaca. Hasil penelitian ini berkaitan dengan indikator media mementingkan factor ekonomi politik daripada kepentingan ruang public. Yakni, pada point menyajikan berita yang sensasional dan info gosip.

Menurut Loupatty, dkk (2019) headline news merupakan perhatian utama para pembaca. Dalam sebuah surat kabar halaman depan atau yang kita sebut headline merupakan bagian paling penting dan menjadi fokus utama dari pembaca ketika melihat surat kabar. Menurut Teori Jarum Hipodermik yang menyatakan media massa mempunyai efek langsung dan sangat menentukan arah audience.

Menurut Juwito (2008:45-46) sebagian besar dalam headline merupakan berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas atau bisa di sebut *straight news*. Kutipan tersebut sesuai dengan hasil yang didapatkan peneliti yaitu, sebanyak 23 berita atau setara dengan 95.8% berbentuk liputan langsung. Yang artinya seorang wartawan melakukan pengumpulan informasi dan menyusun secara mandiri tanpa ada campur tangan orang lain.

Hal ini kemudian berhubungan dengan subjek yang ada pada headline. Ketika sebuah subjek menjadi headline secara otomatis akan mengarahkan perspektif pembaca kepada subjek tersebut. Menurut hasil yang didapatkan oleh peneliti, sebanyak 16 berita menjadikan pemerintah sebagai subjek dalam beritanya. Artinya adalah sekitar 60% berita pembangunan mengangkat pemerintah menjadi subjek yang kemudian dimuat dalam headline. Headline yang mengandung unsur kedekatan emosional kemudian dapat menggiring perspektif pembaca untuk menyatu kedalam isi berita tersebut.

Hasil yang didapatkan oleh peneliti, tema yang mendominasi berita pembangunan daerah adalah soal pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan jumlah 13 berita. Pemberitaan pembangunan daerah lebih kepada pembangunan dalam bentuk fisik. Misalnya progress pembangunan tol antar kota, progress pembangunan ibu kota serta pembangunan sarana infrastruktur yang lain. Pemberitaan pembangunan daerah dengan bentuk fisik menjadi ukuran bahwa pemerintah setempat membawa banyak perubahan. Dengan hal tersebut maka khalayak akan cenderung berpendapat bahwa pemerintah daerah setempat memiliki kinerja yang "Oke".

Dalam isi pemberitaan pembangunan daerah di koran "Kaltim Post", wartawan hanya menampilkan sumber yang berpengaruh, sedangkan sumber pihak netral lainnya tidak berimbang. Hal di atas mungkin terkait dengan kerjasama wartawan dalam menulis berita. Kajian sebelumnya yang dilakukan oleh I Gusti Nugraha Putra bertajuk "Saat Penjaga Gerbang Dibesarkan Kapten: Penguasaan Pengusaha Media Massa", kajian tersebut menuntut wartawan tidak

hanya mampu memberitakan kejadian-kejadian instan di berbagai bidang kehidupan. Pada saat yang sama, ia melaporkan secara lebih mendalam berbagai kehidupan mereka yang berkuasa dengan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Dengan cara ini, pers akan mampu memberikan informasi yang berbeda dengan informasi yang mungkin telah "berhasil" dilakukan oleh pihak berwenang untuk menjaga citranya. Media dapat mempengaruhi bagaimana kekuasaan dikelola dan diperintahkan sehingga dapat lebih memenuhi harapan pihak berwenang.

Sama seperti hasil yang didapatkan oleh peneliti bahwa dari 24 berita yang diteliti 19 diantaranya mengandung isi berita yang bersifat positif. Isi berita pembangunan daerah yang didominasi bersifat positif seperti ingin memperlihatkan bahwa berita pembangunan daerah tersebut mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat. Seperti tidak ada pihak yang dirugikan. Padahal media tidak menampilkan isi berita pembangunan dari sisi yang lain (masyarakat).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusuf Yuksel yang berjudul *An Analysis Of The Media and Government Relationship* menjelaskan mengenai citra positif seseorang dengan kekuasaan sebagai berikut

“They need to cultivate a positive image to get an advantage against their opponents, win public approval and gain political power by using the media

(Kohut, 2007: 190).”

Kutipan diatas menjelaskan citra positif yang ditampilkan dalam media sebetulnya hanya digunakan untuk mengalahkan lawan politik. Dengan citra baik yang ditampilkan dalam media kemudian dimanfaatkan untuk memenangkan persetujuan politik dan mendapatkan kekuasaan politik.

Media dikatakan memiliki peran yang penting sekaligus berpengaruh. Dalam menyebarkan informasi, isi pesan tersebut harus berdasarkan fakta atau realistis, dapat dipertanggungjawabkan dan diandalkan, objektif, serta dapat dijadikan sebagai panutan dan saran control sosial. Bukan tanpa tujuan, hal-hal tersebut harus dilaksanakan demi menghindari adanya kebohongan publik dan tidak merugikan khalayak luas. Namun hasil yang didapatkan peneliti tidak sejalan dengan apa yang seharusnya. Peneliti mendapatkan bahwa dari 24 berita, 18 diantaranya berpihak kepada pemerintah atau setara dengan 75%. Hasil

tersebut membuktikan bahwa adanya keberpihakan jurnalis kepada pihak tertentu.

Keberpihakan tersebut mungkin saja terjadi akibat adanya sebuah tekanan. Seperti yang dikatakan Stephen Reese dalam Desliana Dwita yang berjudul *Televisi dan Kepentingan Pemilik Modal Dalam Perspektif Ekonomi Politik Media* bahwa sesungguhnya isi pesan dalam media merupakan hasil tekanan yang muncul dari dalam dan luar media. Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti isi berita pembangunan daerah yang dimuat dalam media Kaltim Post dapat dikatakan mendapatkan tekanan dari pihak tertentu. Isi dari berita pembangunan daerah tersebut cenderung mengunggulkan pemerintah. Penulisannya dibawakan dengan bahasa yang membangun citra baik pemerintah. Jarang sekali peneliti menemukan berita pembangunan daerah yang berani menjelaskan dampak atau kendala dalam pembangunan. Bahkan peneliti jarang menemukan berita pembangunan daerah yang menjadikan masyarakat sebagai narasumbernya. Suara mayoritas semakin diangkat sedangkan suara minoritas semakin tidak didengar.

Karenanya, konten media adalah kombinasi dari program Internet, keputusan manajemen dan editorial, serta pengaruh eksternal dari sumber selain media, seperti pemberi pengaruh sosial, pejabat pemerintah, pengiklan, dan lainnya. Keberpihakan atau objektivitas ini sejalan dengan indikator media mementingkan faktor ekonomi politik daripada kepentingan ruang public. Yakni, pada point hilangnya batas antara jurnalistik dan bisnis. Profesionalitas jurnalis kembali diuji dengan dihadapkannya perusahaan media dengan keuntungan yang cukup besar. (Dwita, 2016)

Objektivitas pada umumnya berkaitan dengan berita dan informasi. Objektivitas adalah prinsip yang seringkali hanya dihubungkan dengan isi. Asas ini mengandung banyak arti, antara lain: objektivitas adalah nilai inti disiplin profesional yang dibutuhkan jurnalis; dalam budaya modern termasuk dalam berbagai bidang di luar media massa, terutama dalam hal rasionalitas keilmuan dan birokrasi, hal ini Satu prinsip sangat dihargai; objektivitas relevan dan independen; objektivitas diperlukan untuk menjaga kredibilitas (McQuaill, 1996:129).

Kemudian hasil lain yang didapatkan oleh peneliti adalah mengenai cakupan berita, 13 berita memiliki cakupan daerah kabupaten/kota, dan sisanya baru

cakupan provinsi dan kecamatan. Media cetak local memang memiliki konsep yang hanya terbit di daerah tertentu. Koran Kaltim Post merupakan media cetak local terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berita yang dimuat juga terbatas pada wacana daerah. *Headline* juga terbatas pada isu-isu local daerah Kalimantan Timur. Meskipun Kaltim Post merupakan media local, namun tidak bisa dianggap sepele perannya dalam perkembangan media masa di Indonesia.

Meskipun media local telah berkembang pesat, namun terbitannya tidak dapat dikatakan independen secara keseluruhan. Pengaruhnya adalah karena hampir media cetak daerah sebenarnya dimiliki oleh konglomerat media. Kepemilikan media local menjadi ajang perebutan antara dua perusahaan media raksasa, yakni *Jawa Pos Group* dan *Kompas Gramedia*. (Sulhan, 2006: 322)

Kemudian dari segi jumlah berita pembangunan daerah yang dimuat dalam satu kali terbit koran Kaltim Post, hanya terdapat satu hingga dua berita pembangunan daerah. Dengan panjang berita rata-rata satu hingga sepuluh paragraf. Berdasarkan penjabaran hasil diatas, peneliti mengamati adanya dugaan bahwa terdapat praktik ekonomi politik di media Kaltim Post. Peneliti melihat hal tersebut dari aspek yang terlihat secara kasat mata melalui tiap berita pembangunan daerah yang dimuat.

Dalam sudut pandang ekonomi politik, media tidak mampu terlepas dari pihak-pihak yang paling berpengaruh. Media tidak dapat terlepas dari kepentingan negara, pemilik modal, pelaku iklan dan kelompok yang berpengaruh lainnya. Dengan kata lain media merupakan sarana kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Proses seperti ini menunjukkan bahwa arus komunikasi massa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan struktur politik yang sedang berjalan. Logikanya apa yang ditampilkan pada media dengan kenyataannya itu bias dan kurang sesuai. (Dwita, 2016: 258).

Dua elemen substansial yang menentukan perusahaan media tumbuh dan berkembang yang dijelaskan oleh Mukhijab (2015,108) :

Distribusi produk media dan iklan. Iklan merupakan sumber daya ekonomi paling dominan dalam mencapai kapitalisasi bisnis media dan paling menentukan stabilitas ekonomi media, disusul kapitalisasi dari oplah (media cetak), rating (penonton/ pendengar radio dan televisi), pengakses media baru (online).

Praktik ekonomi politik menekan jurnalis dalam menyusun sebuah berita. Profesionalitas media dalam memberikan informasi kepada publik patut untuk

dipertanyakan. Menurut tim *digi-journalism* dalam Lestari (2017:4) terdapat enam aspek yang digunakan untuk melihat profesionalitas media, yakni :

1. Aktualitas
2. Konsistensi Teknis
3. Akurasi Penulisan
4. Akuntabilitas penyebutan sumber
5. Transparansi
6. Kelengkapan berita.

Hasil yang didapatkan oleh peneliti dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melihat profesionalitas media berdasarkan enam aspek diatas. Dari segi aktualitas, berita pembangunan daerah yang disampaikan memang aktual, yakni lebih kepada perkembangan pembangunan secara fisik oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Akan tetapi, berita yang dimuat terkesan homogen. Segi akuntabilitas penyebutan sumber dapat dilihat bahwa dalam setiap berita pembangunan daerah, jurnalis hanya menyebutkan satu hingga dua narasumber saja. Narasumber tersebut juga berasal dari pihak-pihak yang memang memiliki kuasa dan berpengaruh dalam berita tersebut. Segi transparansi juga patut untuk dipertanyakan, karena keberpihakan berita pembangunan daerah lebih condong kepada pemerintah setempat.

Analisis ekonomi politik berfokus pada ruang lingkup yang didominasi oleh perusahaan media. Mulanya media hanya berifat nasional saja. Dimana seluruh informasi yang diberikan berasal dari media nasional yang isinya pemberitaan secara umum. Namun pada masa Orde Baru kemudian membuat perusahaan media berkembang sejalan dengan perkembangan kabupaten/kota baru. Dominasi perusahaan media dilakukan dengan meningkatkan jaringan produksi media secara kualitas dan kuantitas yang dilindungi oleh pihak yang berkuasa. Mulanya hubungan media dengan pemerintah adalah sebagai bentuk pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Pemerintah. Peraturan tersebut semacam petunjuk pelaksanaan Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Publik. Media berperan dalam penyaluran informasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan pesan dan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi hubungan tersebut menciptakan hubungan yang lebih harmonis lagi antara pemerintah dengan media masa

dikarenakan adanya kepentingan yang sama yang saling menguntungkan. Pemerintah sebagai sumber informasi, sementara media sebagai sarana publisitas yang bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hubungan seperti ini kemudian terus mengalir sehingga dijadikan bentuk kerjasama pemasaran. Dimana media mampu menyediakan halaman khusus untuk publikasi kegiatan serta kinerja pemerintah yang diterbitkan secara berkala. Contoh media cetak Kaltim Post ‘menjual’ satu halaman kepada Humas Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 1.5 miliar per tahun, Kabupaten Kutai Timur ‘membeli’ halaman Rp 800 juta per tahun,dll. (Mukhijab, 2015:104-109)

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhamad Sulhan dengan judul Kisah Kelabu di Balik Maraknya Pers Lokal di Kalimantan (2006). Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa terdapat dua media cetak Kalimantan Timur yang pendanaannya disokong oleh politisi, pejabat daerah hingga pengusaha kayu. Media tersebut adalah Swara Kaltim dan Poskota. Kedua media tersebut dimiliki oleh pejabat daerah yang mampu memegang penuh kendali pemerintah sekaligus media local. Perlindungan pemilik modal dalam mengontrol produksi media agar sejalan dengan preferensi yang diinginkan. Proses dominasi dan komersialisasi media ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai konsumen media kini tidak memiliki ruang untuk memilih dan menyaring informasi yang diinginkan

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dan pembahasan bab terdahulu, maka penelitian mengenai Ekonomi Politik Isu-Isu Pembangunan di Media Kaltim Post dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Narasumber memiliki pengaruh dalam penyusunan berita pembangunan daerah. Ada 13 dari 24 berita memiliki narasumber berjumlah 1-2 orang. Hampir keseluruhan narasumber yang dimuat dalam berita adalah pejabat atau orang yang memiliki pengaruh besar dalam proses pemberitaan.
2. Sebanyak 17 dari 24 berita pembangunan daerah berada pada halaman awal. Yakni berkisar antara halaman 1-10. artinya banyak berita pembangunan daerah yang dijadikan headline koran tersebut.
3. Subjek yang ditampilkan pada berita pembangunan daerah mayoritas adalah pemerintah. Hal tersebut menurut hasil yang didapatkan peneliti bahwa 16 dari 24 berita pembangunan daerah bersubjek pemerintah. Berita pembangunan daerah yang bersubjek pemerintah dijadikan headline yang mengandung unsur kedekatan emosional guna menggiring perspektif pembaca.
4. Berita pembangunan daerah didominasi oleh tema pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Pemberitaan pembangunan daerah lebih kepada pembangunan dalam bentuk fisik. Pemberitaan dalam bentuk fisik menjadi ukuran bahwa pemerintah setempat membawa banyak perubahan serta memiliki kinerja yang bagus.
5. Mayoritas berita pembangunan daerah yang dimuat dikoran Kaltim Post bersifat positif. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil yang didapatkan peneliti yakni 19 dari 24 berita bersifat positif. Isi berita pembangunan daerah yang bersifat positif seperti ingin memperlihatkan bahwa berita tersebut mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat.

6. Keberpihakan isi berita 75% adalah berpihak kepada pemerintah. Hasil tersebut membuktikan adanya keberpihakan jurnalis pada pihak tertentu .
7. Hasil yang didapatkan peneliti mengenai sumber berita yaitu, sebanyak 23 berita atau setara dengan 95.8% berbentuk liputan langsung. Yang artinya seorang wartawan melakukan pengumpulan informasi dan menyusun secara mandiri tanpa ada campur tangan orang lain.
8. Hasil dari cakupan berita yaitu, sebanyak 13 berita memiliki cakupan wilayah kabupaten/kota. Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa media Kaltim Post sudah sesuai dengan prinsip media cetak lokal yakni, hanya terbit didaerah tertentu serta isu-isu yang diangkat terbatas isu lokal daerah.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini sudah diusahakan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, namun masih beberapa keterbatasan yaitu:

1. Peneliti tidak dapat melihat langsung proses produksi berita yang dilakukan oleh Kaltim Post. Oleh sebab itu peneliti tidak dapat meneliti secara lebih mendalam.

C. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan ada beberapa saran yang dapat diajukan yaitu:

1. Bagi Media Kaltim Post
 - a. Kaltim Post diharapkan menjadi media yang mengedepankan kepentingan publik, dari pada mementingkan perusahaan secara ekonomi.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Memiliki jaringan relasi yang mampu membantu memperlihatkan proses dalam pembuatan berita. Karena tidak sedikit media massa yang susah untuk terbuka dan tidak transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Barant, S. 2010. Pengantar Komunikasi Massa: Literasi Media dan Budaya. Jakarta: Salemba

Chomsky, N, & Herman, E, S. 2002. Manufacturing Consent. United States. Pantheon Books

Deliarnov.2006. Ekonomi Politik.Jakarta.Erlangga

Dwita, Desliana. 2016. Televisi dan Kepentingan Pemilik Modal Dalam Perspektif Teori Ekonomi Politik Media. *Jurnal Ipteks Terapan, Vol8.i4 (252-261)*.

Eriyanto, (2011). Analisis Isi. Jakarta : Prenada Media

Habsari, Sinung Utami Hasri. 2012. Spasialisasi kelompok media mnc

Hardy Jonathan.2014.The Political Economy of Media: Introduction. New York.Routledge

Juwito.2008. Menulis Berita dan Feature's. Surabaya:Unesa University Press

Kartono, D, T., & Nurcholis, H. Konsep dan Teori Pembangunan

Kurniawan, Eko.2006. Studi analisis isi pemberitaan media massa tentang lingkungan hidup dan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di kabupaten Bangka

Kurniawan, S. (2016). Tahun Lalu, Total Belanja Iklan Pemerintah Rp 7,3 Triliun. Diambil dari Website Marketeers Indonesia #1 Marketing Media & Mice: <http://marketeers.com/tahun-lalu-total-belanja-iklan-pemerintah-rp-73-triliun-2/>

Larisu, Z. 2017. Peran Televisi Lokal dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol5, (103-112)*.

Lestari, R, D. 2017. *Quality News dan Popular News Sebagai Trend Pemberitaan Media Online. Jurnal Komunikasi Vol5 (83-94)*.

Loupatty, R, M, R., Koagouw, F, V, I, A., & Kalesaran, E, R. (2019). Pengaruh Berita Utama (Headline News) Terhadap Pembaca Harian Kabar Timur Di Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon

McManus, John H. 1994. *Market-Driven Journalism: Let the Citizen Beware*. London: SAGE Publication Ltd

McQuail, Dennis. 1996. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.

McQuail, Dennis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Salemba Humanika

Mosco, V. 1996. *The Political Economy of Communication : rethinking and renewal*,
London: Sage Publication

Mukhijab.2015. *Membaca Relasi Media-Pemerintah pada Era Otonomi Daerah*

Nashrudin, Achmad. 2017. *Ekonomi Politik Media : Pada Pemberitaan
Pemilukada Banten 2011 Oleh Radar Banten Dan Baraya Tv*

Nurhidayah, Evfi. (2020). *Paradigma Post Positivisme*. Diambil dari Website
Rainbow Knowledge One science adds one color of knowledge:
<http://blog.unnes.ac.id/efvinurhidayah/2017/12/03/paradigma-post-positivisme/>

Prat, A, & Stomberg, D. 2013. *The Political Economy of Mass Media. Discussion
Paper No. 8246, (1-57)*. Doi: 10.1017/CBO9781139060028.004

Putra, I G, N. 2008. *Ketika Watchdog di Pelihara Para Juragan : Kontrol Penguasa
Terhadap Media Massa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol12, (121-256)*.

Rakhmat, Jalaluddin. 1991. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.

Reese, S, D. 1991. *Setting the media's Agenda: A power balance perspective*, Beverly
Hills: Sage.

Rianto, P. 2005. Jurnalisme dalam tatanan Neoliberal dan Krisis Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol9, (113-130).

Sasmito, Cahyo and Dyana Sari.2018.PENGANTAR EKONOMI POLITIK akses https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3331869

Sjafari, a. (2012). kontribusi ilmu komunikasi dalam pembangunan. *seminar dan konferensi nasional ilmu komunikasi* (pp. 215-216). serang: program studi ilmu komunikasi fisip untirta

Sucahya, M. 2013. Ruang publik dan ekonomi politik media. *Jurnal Komunikasi*, Vol2, (15-22).

Sudibyo, A.2000. Absennya Kajian Ekonomi Politik Media di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol4, (115-134).

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA

Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2010 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta

Sulhan, Muhamad. 2006. Kisah Kelabu di balik Maraknya Pers Lokal di Kalimantan

Sumitro, D. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi : dasar teori ekonomi
pertumbuhan dan ekonomi pembangunan. Edisi pertama, Jakarta : Pustaka LP3ES.

Susanto, Eko Harry. 2014. MEDIA MASSA, KETERBUKAAN INFORMASI DAN
KEKUASAAN NEGARA

Tika, M, P. 1997. Metode Penelitian Geografi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.

Wandik, Mileur dkk. 2017. PROSES PENENTUAN HEADLINE SURAT KABAR
(Studi Pada Surat Kabar Harian Manado Post)

Yuksel, Y. 2013. An Analysis of The Media and Government Relationship. (57-70)

